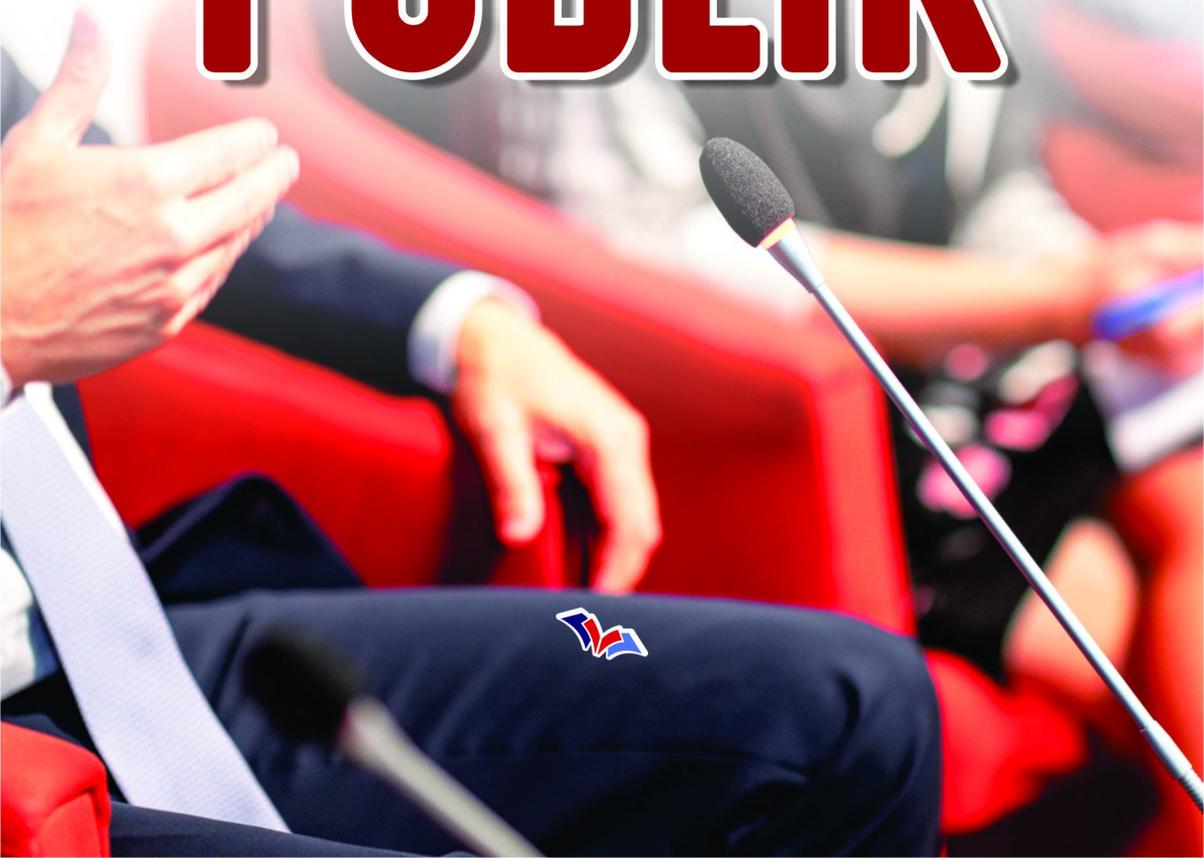


Tri Prasetijowati

DASAR-DASAR

ETIKA PUBLIK



DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **1 (satu) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)**.
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **3 (tiga) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**.
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama **10 (sepuluh) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)**.

DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

Tri Prasetijowati



DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

Tri Prasetyowati

Copyright©2025

Desain Sampul
Raja

Editor
Heru Irianto

Penata Letak
M. Fahri

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang
Ketentuan Pidana Pasal 112-119
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
Tanpa izin tertulis dari penerbit

Diterbitkan dan dicetak pertama kali oleh
Jakad Media Publishing
by **PT. JEEF Legal Corpora**
Graha Indah E-11 Gayung Kebonsari Surabaya
(031) 8293033, 081230444797, 081234408577
 <https://jeeflegalcorpora.com/>  <https://jakad.id/>
 jakadmedia@gmail.com

Anggota IKAPI
No. 222/JTI/2019

ISBN: 978-634-7228-19-2
vi + 110 hlm.; 15,5x23 cm

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Teriring ucapan puji syukur ke hadirat Allah SWT, pembuatan buku Dasar-dasar Etika Publik telah selesai. Buku ini didalamnya berisi konsep dasar etika, sejarah etika, teori-teori etika, nilai etika dan dasar etika, perbandingan etika, etika penyelenggara negara, etika pelayanan publik dan kode etik. yang diharapkan dapat sebagai pegangan dalam mempelajari tentang dasar-dasar etika publik.

Dengan mengucapkan banyak terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh keluarga ,Orang tua kami yang telah tiada juga suami tercinta dan ananda, dan semua pihak yang mendukung yang telah memberikan semangat dan dukungannya sehingga dapat menyelesaikan penulisan buku ini. Dan penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penulisan ini karena penulis menyadari bahwa tiada gading yang tak retak maka kami mohon dan menerima berbagai masukan dan saran yang sangat berguna dalam perbaikan buku ini.

Surabaya, Maret 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
PENDAHULUAN	1
BAB I : KONSEP DASAR ETIKA.....	4
A. Pengertian Etika	5
B. Objek Etika.....	10
C. Firasat	16
D. Perilaku.....	18
E. Perasaan	19
F. Frustrasi	20
BAB II : SEJARAH SINGKAT ETIKA ADMINISTRASI NEGARA/PUBLIK.....	24
A. Pengertian Etika Administrasi Negara.....	25
B. Prinsip-prinsip Etika Administrasi Negara	25
BAB III : TEORI-TEORI ETIKA.....	33
A. Tokoh-tokoh Etika	34
B. Teori-teori Etika	39

C. Etika Administrasi Publik.....	43
BAB IV : NILAI-NILAI DASAR ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK.....	49
A. Dasar-dasar Etika	50
B. Etika, Etiket, Kode Etik, Hukum.....	52
C. Budi Pekerti	53
D. Etika Minus, Etika Nol dan Etika Plus	55
BAB V : PERBANDINGAN ETIKA.....	57
BAB VI : ETIKA PENYELENGGARA NEGARA	64
A. Etika Jabatan	65
B. Etika Penyelenggara Negara	66
C. Sanksi Terhadap Pelanggaran Etika Penyelenggara Negara.....	66
D. Etika Profesi	67
BAB VII : ETIKA PELAYANAN PUBLIK.....	76
A. Paradigma Etika Pelayanan Publik.....	78
B. Pendekatan Etika Pelayanan Publik	81
C. Etika Birokrasi Pelayanan Publik.....	82
BAB VIII: KODE ETIK.....	85
A. Kode Etik.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN.....	83
TENTANG PENULIS	93
SINOPSIS	110

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	Tolok Ukur 3 M.....	53
Tabel 5.1.	Perbandingan Etika di Negara Maju dan Negara Berkembang.....	58
Tabel 5.2.	Persamaan Antara Etika di Negara Maju dan Negara Berkembang.....	59
Tabel 5.3.	Perbandingan Etika Administrasi Publik Negara ASEAN.....	61
Tabel 5.4.	Perbandingan Etika Administrasi Publik di Indonesia dan di Timor Leste.....	62

Pendahuluan_

PENDAHULUAN

Etika adalah bagian penting dari kehidupan manusia. Etika membantu kita untuk membedakan antara benar dan salah, baik dan buruk, serta untuk bertindak dengan cara yang bertanggung jawab dan adil. Dengan mempelajari etika penting untuk mengembangkan karakter dan kebajikan moral, membuat keputusan yang bertanggung jawab dan adil, membangun hubungan yang baik dengan orang lain, dan menciptakan masyarakat yang lebih baik.

Administrasi publik merupakan bidang yang kompleks dan penuh dengan dilema etika. Di satu sisi, administrator publik memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat dan bertindak demi kepentingan publik. Di sisi lain, mereka sering kali dihadapkan dengan berbagai godaan untuk bertindak tidak etis, seperti suap, nepotisme, dan korupsi.

Etika adalah bagian penting dari administrasi publik. Administrator publik yang bertindak secara etis dapat membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memastikan bahwa layanan publik yang diberikan berkualitas tinggi.

Administrasi publik adalah bidang yang penting dalam kehidupan masyarakat. Administrator publik bertanggung jawab untuk mengelola berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang juga bertanggung jawab untuk membuat dan melaksanakan kebijakan publik.

Tujuan pembuatan buku ini sebagai bahan ajar yang dapat dipergunakan dalam perkuliahan etika administrasi publik

ataupun dapat dipergunakan pada mata kuliah yang terkait lainnya. Dan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang etika administrasi publik bagi kalangan mahasiswa maupun masyarakat umum.

Bab 1
Konsep Dasar Etika

BAB I

KONSEP DASAR ETIKA

A. Pengertian Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani yakni "*Ethos*", mempunyai arti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Etika dari "*Ethikos*" berarti timbul dari kebiasaan merupakan cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kuantitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk dan tanggung jawab.

Etika dalam bentuk jamak '*ta etha*' berarti adat kebiasaan sebagai tinjauan oleh Aristoteles dalam filsafat moral berarti ilmu tentang hal-hal yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan dan juga ada kata moral dari bahasa latin artinya sama dengan etika .

Kata etika adalah '*ethikos*' dalam bahasa Yunani. Merujuk serapan bahasa Yunani tersebut, arti dari etika adalah timbul dari kebiasaan. Sedangkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).

DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

Munculnya etika adalah saat manusia merefleksikan unsur-unsur etis ke dalam pendapat-pendapat yang spontan. Kebutuhan akan refleksi tersebut bisa dirasakan, karena pendapat etis bisa saja berbeda dengan pendapat orang lain. Itulah mengapa akhirnya dibutuhkan etika, di mana tujuannya untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan oleh manusia.

1. Aristoteles

Pengertian etika adalah dibagi menjadi dua, *Terminusus Technikus* dan *Manner and Custom*. *Terminusus Technikus* adalah etika yang dipelajari sebagai ilmu pengetahuan dengan mempelajari suatu problema tindakan atau perbuatan manusia.

Sedangkan *Manner and Custom* adalah pembahasan etika yang berhubungan atau berkaitan dengan tata cara serta adat kebiasaan yang melekat pada kodrat manusia yang sangat terkait dengan arti baik dan buruk suatu perilaku, tingkah laku atau perbuatan manusia.

2. K. Bertens

Pengertian etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral, yang jadi pegangan seseorang atau suatu kelompok untuk mengatur perilaku.

3. W. J. S. Poerwadarminto

Pengertian etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral.

4. Hamzah Yakub

Pengertian etika adalah menyelidiki suatu perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk.

5. Soegarda Poerbakawatja
Pengertian etika adalah sebuah filsafat berkaitan dengan nilai-nilai, tentang baik dan buruknya tindakan dan kesusilaan.
6. Drs. O. P. Simorangkir
Pengertian etika adalah pandangan manusia terhadap baik dan buruknya perilaku manusia.
7. Prof. DR. Franz Magnis Suseno
Pengertian etika adalah ilmu yang mencari orientasi atau ilmu yang memberikan arah dan pijakan dalam tindakan manusia.
8. Drs. Sidi Gajabla
Pengertian etika adalah teori tentang perilaku atau perbuatan manusia yang dipandang dari segi baik dan buruknya sejauh mana dapat ditentukan oleh akal manusia.
9. Drs. H. Burhanudin Salam
Pengertian etika adalah suatu cabang ilmu filsafat yang berbicara tentang nilai-nilai dan norma yang dapat menentukan perilaku manusia dalam kehidupannya.
10. James J. Spillane SJ
Pengertian etika adalah mempertimbangkan atau memperhatikan tingkah laku manusia dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan moral. Etika lebih mengarah pada penggunaan akal budi manusia dengan objektivitas untuk menentukan benar atau salahnya serta tingkah laku seseorang kepada orang lain.
11. Soegarda Poerbakawatja
Pengertian etika adalah sebuah filsafat berkaitan

DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

dengan nilai-nilai, tentang baik dan buruknya tindakan dan kesusilaan.

12. Ramali dan Pamuncak

Pengertian etika adalah pengetahuan tentang perilaku yang benar dalam profesi.

13. Maryani dan Ludigdo

Pengertian etika adalah seperangkat norma, aturan atau pedoman yang mengatur segala perilaku manusia, baik yang harus dilakukan dan yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok masyarakat atau segolongan masyarakat.

14. Ahmad Amin

Pengertian etika adalah suatu ilmu yang menjelaskan tentang arti baik dan buruk serta apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, juga menyatakan sebuah tujuan yang harus dicapai manusia dalam perbuatannya dan menunjukkan arah untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia.

15. Martin

Pengertian etika adalah suatu disiplin ilmu yang berperan sebagai acuan atau pedoman untuk mengontrol tingkah laku atau perilaku manusia.

Etika ialah ilmu tentang baik dan buruknya perilaku, hak dan kewajiban moral; sekumpulan asa atau nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak; nilai mengenai benar atau salahnya perbuatan atau perilaku yang dianut masyarakat.

16. Drs. H. Burhanudin Salam

Pengertian etika adalah suatu cabang ilmu filsafat yang berbicara tentang nilai-nilai dan norma yang dapat menentukan perilaku manusia dalam kehidupannya.

17. Asmaran

Pengertian etika adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia, tidak hanya menentukan kebenaran seperti mereka, tetapi juga untuk menyelidiki manfaat atau keuntungan dari semua perilaku manusia.

18. A. Mustafa

Pengertian etika adalah ilmu yang menyelidiki terhadap perilaku mana yang baik dan yang buruk dan juga dengan memperhatikan perbuatan manusia sejauh apa yang telah diketahui oleh akal pikiran.

19. W.J.S. Poerwadarminto

Pengertian etika adalah ilmu pengetahuan mengenai asas-asas atau dasar-dasar moral dan akhlak.

20. Bertens

Pengertian etika adalah nilai dan norma moral yang menjadi acuan bagi manusia secara individu maupun kelompok dalam mengatur segala tingkah lakunya.

Menurut Bertens, ada tiga arti penting etika sebagai yaitu:

- a. Nilai-nilai moral dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah laku yang disebut sistem nilai.
- b. Kumpulan asas atau nilai moral yang sering dikenal dengan kode etik.
- c. Ilmu tentang yang baik atau buruk yang disebut filsafat moral (Yeremias T.Keban, 2019, h.193).

DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

B. Objek Etika

Objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Beda dengan ilmu-ilmu lain yang mempelajari tingkah laku manusia, sudut pandang etika adalah sudut pandang normatif. Maksudnya etika adalah melihat dari sudut baik atau buruk suatu perbuatan manusia. Etika memiliki fungsi sebagai tempat mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan beragam keadaan moralitas yang membingungkan.

Selain itu, etika adalah menunjukkan adanya keterampilan intelektual. Keterampilan intelektual adalah sebuah keterampilan untuk berargumentasi dengan rasional dan kritis. Lalu, etika berfungsi untuk orientasi etis, di mana sangat diperlukan dalam mengambil suatu sikap yang wajar dalam kondisi pluralisme.

Berikut ciri-ciri etika yang perlu diketahui adalah:

1. Sifat dari absolut atau mutlak.
2. Etika untuk menilai baik atau buruknya perilaku seseorang
3. Etika sangat berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia.
4. Etika juga berkaitan dengan cara pandang dari sisi batin manusia.
5. Kemudian, etika akan selalu berlaku meski tidak ada orang lain yang menyaksikan.

Jenis-jenis etika yaitu:

1. Etika Filosofis

Etika yang bersumber dari aktivitas berpikir yang dilakukan manusia adalah jenis etika filosofis atau bagian dari filsafat. Filsafat adalah salah satu bidang ilmu yang

mengutamakan tentang pikiran manusia yang dibagi lagi menjadi dua sifat yaitu empiris dan non empiris.

2. Etika Deskriptif

Merupakan usaha menilai tindakan berdasarkan pada ketentuan atau norma baik buruk yang tumbuh dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat, dimana etika deskriptif menempatkan kebiasaan yang sudah ada di dalam masyarakat sebagai acuan etis.

Yang termasuk dalam etika deskriptif adalah pendirian-pendirian mengenai baik dan buruk, norma-norma kesusilaan yang pernah berlaku, dan cita-cita kesusilaan yang dianut oleh bangsa-bangsa tertentu apakah terjadi penerimaan dan bagaimana pengolahannya.

3. Etika Normatif

Etika normatif mendasarkan diri pada sifat hakiki kesusilaan bahwa di dalam perilaku serta tanggapan-tanggapan kesusilaannya, manusia menjadikan norma-norma kesusilaan sebagai panutannya. Etika normatif tidak dapat sekadar melukiskan susunan-susunan formal kesusilaan, namun juga menunjukkan perilaku manakah yang baik buruk. Contoh dari etika normatif adalah etika yang bersifat individual seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab.

4. Etika Deontologi

Merupakan suatu tindakan dinilai baik buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban, artinya tindakan dianggap baik karena tindakan itu memang baik pada dirinya sendiri, sehingga merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Sebaliknya

DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

suatu tindakan dinilai buruk secara moral karena tindakan itu memang buruk secara moral sehingga tidak menjadi kewajiban untuk kita lakukan. Etika deontologi menekankan motivasi, kemauan baik dan watak yang kuat untuk bertindak sesuai dengan kewajiban.

5. Etika Teleologi

Etika Teleologi menilai baik buruk suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat dari tindakan tersebut, sehingga suatu tindakan dinilai baik kalau bertujuan baik dan mendatangkan akibat baik.

Manfaat Etika yang Perlu Diketahui

Ada berbagai manfaat yang bisa diambil dari sebuah etika, diantaranya:

1. Dengan etika, maka manusia dapat menolok suatu pendirian yang ada di antara beragam pandangan dan moral.
2. Etika juga berguna untuk membedakan yang mana yang tidak boleh diubah dan yang mana yang boleh diubah.
3. Etika juga dapat menyelesaikan masalah-masalah moralitas maupun keadaan sosial lainnya yang membuat bingung suatu masyarakat dengan adanya pemikiran yang sistematis dan kritis.
4. Etika juga akan menggunakan suatu nalar sebagai dasar pijak, tidak menggunakan suatu perasaan yang dapat merugikan banyak orang yaitu berpikir dan bekerja dengan sistematis dan teratur.
5. Etika bisa menyelidiki suatu masalah hingga ke akar-akarnya tidak hanya karena

Etika jika ditinjau dari istilahnya mempunyai tiga arti yaitu:

1. Nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya yang bisa disebut sistem nilai.
2. Kumpulan asas atau nilai moral (kode etik)
3. Ilmu tentang baik atau buruk, menjadi ilmu apabila kemungkinan-kemungkinan etis dijadikan bahan refleksi bagi suatu penelitian sistematis dan metodis, sama artinya dengan filsafat moral.

Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai moral dan bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan manusia.

Etika membantu kita untuk membedakan antara benar dan salah, baik dan buruk, serta untuk bertindak dengan cara yang bertanggung jawab dan adil.

Etika mengacu pada standar benar dan salah didasarkan pada standar yang menentukan apa yang seharusnya dilakukan manusia (tugas, prinsip, kebajikan atau manfaat bagi masyarakat).

Dalam konteks etika administrasi dapat diidentifikasi empat dimensi atau sumber etika:

1. Tugas: perilaku yang diharapkan dari orang yang menempati peran tertentu: kewajiban yang diambil ketika mengambil peran atau profesi.
2. Nilai: kualitas yang menentukan orang yang baik, keunggulan moral.
3. Prinsip: kebenaran mendasar yang membentuk dasar bagi perilaku.

DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

4. Manfaat bagi masyarakat: tindakan yang menghasilkan kebaikan terbesar.

Etika administrator publik dimulai dengan dan didasarkan pada tugas yaitu memiliki kepentingan khusus untuk melayani publik. Dimana etika menyiratkan berbagai perilaku yang diharapkan dan refleksi hal yang harus dilakukan dan tugas berarti tindakan yang diperlukan oleh pekerjaan atau fungsi seseorang.

Etika administrator publik dimulai dari tugas dalam arti mereka yang mencari posisi dalam organisasi sektor publik umumnya dimotivasi oleh dorongan tugas untuk melayani (motivasi pelayanan publik) Administrator publik dituntut jujur, independen, kompeten dan berkomitmen untuk melakukan yang terbaik.

Urutan konsep-konsep agama, etika, firasat, perilaku, dan kepribadian dalam konteks hubungan dan pengaruhnya satu sama lain bersifat relatif dan dapat bervariasi pada perspektif dan konteks yang berbeda:

1. Konsep Agama
 - a. Agama sering kali menjadi landasan utama dari nilai-nilai moral dan etika seseorang. Ajaran agama memberikan pedoman tentang bagaimana seharusnya seseorang berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain.
 - b. Agama juga dapat membentuk pandangan dunia seseorang, termasuk tentang tujuan hidup, kebaikan, dan kejahatan.
2. Etika
 - a. Etika merupakan sistem nilai yang mengatur perilaku

manusia. Etika dapat berasal dari agama, filsafat, atau kesepakatan sosial.

- b. Etika menjadi jembatan antara ajaran agama dan perilaku sehari-hari.
3. **Firasat**
 - a. Firasat adalah intuisi atau perasaan yang mendalam tentang sesuatu. Firasat sering kali dipengaruhi oleh pengalaman hidup, pengetahuan, dan keyakinan seseorang.
 - b. Firasat dapat menjadi pemandu dalam pengambilan keputusan, namun tidak selalu dapat diandalkan.
 4. **Perilaku**
 - a. Perilaku adalah manifestasi nyata dari agama, etika, firasat, dan kepribadian seseorang.
 - b. Perilaku dapat dipengaruhi oleh faktor internal (seperti nilai-nilai, emosi, dan motivasi) dan faktor eksternal (seperti lingkungan sosial, budaya, dan tekanan sosial).
 5. **Kepribadian**
 - a. Kepribadian adalah pola karakteristik yang unik pada setiap individu. Kepribadian terbentuk dari interaksi antara faktor genetik dan lingkungan.
 - b. Kepribadian dapat mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku, termasuk dalam konteks agama, etika, dan firasat.

Hubungan Antar Konsep:

1. Agama membentuk etika yang kemudian memengaruhi perilaku.

DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

2. Etika menjadi pedoman dalam mengambil keputusan berdasarkan firasat.
3. Kepribadian yang terbentuk dari berbagai faktor, termasuk agama dan etika, akan mewarnai perilaku seseorang.
4. Perilaku yang berulang-ulang akan memperkuat kepribadian.

Contoh: Orang yang beragama tertentu akan memiliki nilai-nilai etika, atau etika, yang mereka anut, yang memengaruhi cara mereka berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, atau perilaku. Dalam situasi tertentu, dia mungkin menggunakan firasatnya untuk membuat keputusan, tetapi nilai-nilai moral yang dia anut tetap akan memengaruhi keputusannya. Semua elemen ini akan membentuk kepribadiannya.

C. Firasat

Firasat dapat menjadi alat yang berharga dalam kehidupan sosial, tetapi penting untuk menggunakannya dengan etika dan moral. Kita harus selalu sadar akan potensi bias dan prasangka, dan kita harus berusaha untuk membuat penilaian yang adil dan objektif.

Firasat, yang sering diartikan sebagai kemampuan untuk menebak atau merasakan sesuatu tanpa bukti konkret, dan firasat memiliki hubungan yang kompleks dengan etika dan moral. Berikut beberapa poin pentingnya:

Firasat adalah cahaya yang Allah letakkan di dalam kalbu hamba-Nya agar dengan cahaya itu seorang hamba dapat membedakan antara yang baik dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang palsu dan yang asli serta yang jujur dan

yang dusta (Imam F,12). Firasat adalah antusias atas keadaan-keadaan batiniah (yang tidak terlihat) berdasarkan pada pertanda-pertanda lahiriah (yang kasat mata) (Imam F,45).

Firasat mempunyai potensi penting dalam etika dan moral yaitu:

1. Potensi Manfaat

Firasat dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dalam interaksi sosial, bisa lebih peka terhadap potensi bahaya atau ketidakjujuran orang lain sehingga dapat membantu kita membangun kepercayaan dan hubungan yang lebih kuat dengan orang lain.

2. Potensi Bahaya

Firasat dalam potensi bahaya dapat menjerumuskan kita ke dalam prasangka dan stereotip., bisa salah menilai orang lain *based on* penampilan, bahasa tubuh, atau faktor lain yang tidak relevan serta penggunaan firasat yang tidak etis dapat menimbulkan diskriminasi dan perlakuan tidak adil.

3. Prinsip Etika dan Moral

Prinsip ini penting untuk menggunakan firasat dengan hati-hati dan bertanggung jawab dalam mempertimbangkan semua bukti yang tersedia sebelum membuat penilaian. Hal ini harus menghormati privasi dan martabat orang lain dan jangan menggunakan firasat untuk menjustifikasi diskriminasi atau prasangka.

4. Pentingnya Kesadaran Diri

Dalam potensi kesadaran diri perlu memahami potensi bias yang mungkin kita miliki harus terbuka untuk informasi baru yang dapat menantang firasat kita

DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

dan harus selalu berusaha untuk adil dan objektif dalam penilaian.

Contoh dalam firasat sebagai berikut:

1. Sebagai seorang dokter mungkin menggunakan firasatnya untuk mendiagnosis pasien, tetapi dia harus selalu mengandalkan bukti ilmiah dan pemeriksaan medis untuk memastikan diagnosisnya.
2. Sebagai seorang perekrut kerja mungkin menggunakan firasatnya untuk mengevaluasi kandidat kerja, tetapi dia harus berhati-hati untuk tidak mendiskriminasi kandidat berdasarkan penampilan atau firasat pribadi.

D. Perilaku

Manusia pada kehidupan sebagai individu dan masyarakat tidak dapat terpisah tetapi saling tanggung jawab berhubungan satu dengan yang lainnya. Di dalam manusia mempunyai kesadaran kehendak yang berupa tindakan, perbuatan, sikap, dan perilaku bersifat rohaniah dan batiniah bersumber dari adat dan kebiasaan berupa kesadaran moral, etik dan tanggung jawab.

Kesadaran diri menurut Drs. AW. Wijaya diartikan mengerti dan merasa misalnya tentang harga diri dan lain-lain. Kesadaran diri merupakan sikap/perilaku mengetahui atau mengerti, taat dan patuh pada adat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.

Kesadaran timbul karena adanya pengekanan dari luar maupun dari dalam dimana sebagai konsekuensinya tidak hanya dikaitkan kelengkapan perundangan saja melainkan dikaitkan juga dengan kesadaran pribadi terhadap moral dan etik dan lingkungannya.

Bentuk tingkah laku (perilaku) instrumental menurut Morgan dalam buku AW. Wijaya sebagai berikut:

1. Aktivitas
2. Gerakan-gerakan naluriah
3. Refleks
4. Belajar secara instrumental.

Tahapan-tahapan sampai pada tingkah laku sebagai berikut:

1. Ada atau timbulnya motif
2. Pertarungan (kompetitif) antar motif apabila ada beberapa motif
3. Mengambil keputusan, memilih salah satu motif
4. Mewujudkan tingkah laku bermotivasi.

E. Perasaan

Perasaan ditinjau dalam etika menurut Max Scheler ada empat golongan yakni:

1. Pengindraan adalah perasaan yang berhubungan dengan pengindraan (rasa panas, dingin, sakit)
2. Vital adalah perasaan berhubungan dengan keadaan tubuh (rasa segar, lesu, lemah, letih)
3. Psikis adalah menyebabkan perubahan-perubahan psikis (rasa senang, sedih, gembira)
4. Pribadi yaitu yang dialami secara pribadi (rasa terasing, terpojok, berdosa).

Menurut E. B. Titchener, ciri-ciri perasaan yaitu:

1. Dapat dilihat intensitasnya yaitu lemah dan kuatnya seperti rasa mangkel, agak mangkel, mangkel sekali.

DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

2. Dapat dilihat kualitasnya yaitu perasaan sedih dan gembira.
3. Menghinggapi seseorang jangka waktu tertentu (perasaan sebentar hilang, dan ada yang bertahan lama)

Menurut W. Wundt membagi atas:

1. *Lust* dan *unlust* (menyenangkan dan tidak menyenangkan)
2. *Erregung* dan *beruhegung* (menggelora dan tenteram)
3. *Spannung* dan *losung* (tegang dan lega)

F. Frustrasi

Bila seseorang frustrasi tidak dapat mengatasi rintangan dalam mencapai tujuan yang bisa mengarah pada depresi mental dan stres. Hal ini terbentuk bila lingkungan motivasi tidak terbentuk:

1. Frustrasi: diri sendiri, lingkungan, alam, sosial, cacat, agresif, psikomatik, kaku/bodoh
2. Reaksi: defensif, alkohol, penyesuaian
3. Menghadapi: reaksi/kebalikan, proyeksi, rasionalisasi, pengalihan (*displacement*, substitusi, sublimasi, menahan/mengekang)

Psikologi menurut Plato yaitu:

Ide bersifat kekal sedang materi tidak bersifat kekal, mati Tricotomi menurut Plato yaitu:

1. Berpikir --- otak
2. Kehendak – dada
3. Keinginan – perut

Maka di dunia terdapat tiga kebajikan (wisdom) yaitu:

1. Kebijaksanaan bila akal menguasai manusia
2. Keberanian bila kehendak menguasai manusia
3. Penguasaan bila keinginan menguasai manusia

Sedang menurut wijaya psikologi manusia dalam berperilaku dan bertingkah laku dalam tiga tempat disebut (3H) yaitu:

1. *Head* --- akal pikir, nalar
2. *Heart* --- hati nurani
3. *Hand* --- kegiatan atau aktivitas, nafsu.

Ketiganya merupakan gambaran segitiga sama sisi yaitu ada keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara nalar, nurani, nafsu. Dimana manusia dapat mengendalikan nafsu berdasarkan nalar dengan pertimbangan nurani.

Empat pandangan perilaku etis Wijayanti dalam Abd. Rohman secara umum diidentifikasi dalam empat golongan yaitu:

1. *Utilitarian View*

Dimana prinsip dasarnya bahwa perilaku etis memberikan kebaikan dan manfaat bagi banyak orang, dalam pemikiran John Stuart Mill filosof abad ke-19 dalam pandangannya melihat dampak secara moral dari sebuah keputusan yang dibuat. Pandangan ini menggunakan metode kualitatif dalam pengambilan atau pembuatan keputusan organisasi dan lebih cenderung menekankan bagaimana cara memberikan manfaat atau kebaikan sebesar-besarnya bagi banyak orang.

2. *Individualism View*

Pandangan ini berdasar prinsip bahwa perkembangan

DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

jangka panjang kepentingan diri seseorang merupakan komitmen utama seseorang. Pandangan ini secara sederhana menargetkan capaian bahwa setiap orang harus berlaku jujur dan berintegritas dalam meraih tujuannya.

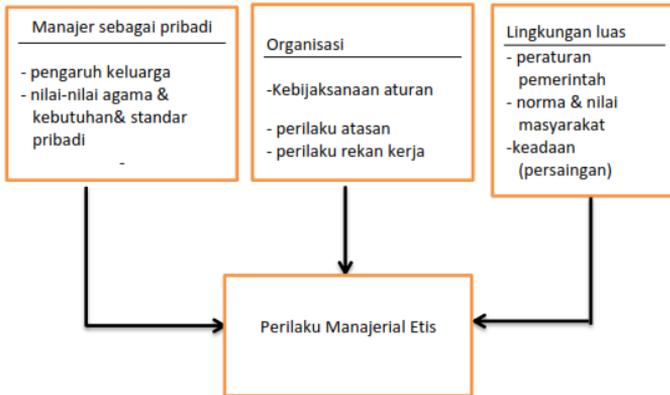
3. Moral-rights View

Pandangan kebenaran moral yang mendasarkan prinsip bahwa semua orang harus melindungi dan menghargai hak asasi manusia. Menurut John Locke dan Jefferson bahwa hak orang untuk hidup, bebas serta diperlukan secara adil oleh hukum tidak bisa diganggu gugat.

4. Justice-view

Pandangan keadilan berprinsip bahwa perilaku etis adalah bagaimana memperlakukan orang secara adil dan tidak memihak sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku, dan menilai aspek etis tidaknya suatu perilaku dari setiap keputusan berdasarkan sejauh mana tingkat keadilan keputusan tersebut bagi siapa yang terpengaruh atau termasuk dalam lingkup keputusan tersebut.

Faktor-faktor mempengaruhi etika manajerial (pimpinan) alam dilihat dalam gambar di bawah ini:



Bab 2

Sejarah Singkat Etika Administrasi Negara/Publik_

BAB II

SEJARAH SINGKAT

ETIKA ADMINISTRASI NEGARA/PUBLIK

A. Pengertian Etika Administrasi Negara

Etika Administrasi Negara (Pasalong,2007) dalam Agus H diartikan filsafat dan profesional standar (kode etik) atau *right rules of conduct* (aturan berperilaku yang benar) dan seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik atau administrasi negara.

Etika administrasi negara adalah aturan atau standar pengelolaan, arahan moral bagi anggota organisasi atau pekerjaan manajemen; standar pengelolaan yang merupakan arahan moral administrator publik dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. Aturan atau standar etika administrasi negara terkait dengan kepegawaian, perbekalan, keuangan, ketatausahaan, dan hubungan masyarakat.

B. Prinsip-prinsip Etika Administrasi Negara

Prinsip-prinsip ini dapat menjadi patokan dalam berperilaku dan berprofesi para birokrat sebagai penyelenggara administrator penyelenggara negara, pembuat kebijakan, birokrasi maupun dalam konteks pelayanan publik.

DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

Menurut Supriya (2001), di dalam Agus H terbagi menjadi enam bagian sebagai berikut:

1. Prinsip Keindahan (*Beauty*)

Mendasari segala sesuatu yang mencakup rasa senang terhadap keindahan. Bahwa hidup dan kehidupan manusia itu sendiri sesungguhnya merupakan kehidupan. Dengan prinsip ini etika manusia berkaitan atau memperhatikan nilai-nilai keindahan, seseorang memerlukan penampilan yang serasi dan indah atau enak dipandang dalam berpakaian. Contoh tidak etis seseorang memakai pakai olah raga dalam jam kerja atau tidak patut seseorang menghadapi tamu dengan pakaian minim. Etika pengelolaan kantor dilandasi oleh nilai-nilai estetika antara lain diwujudkan dengan perancangan tata ruang, furnitur, hiasan dinding, aksesoris lain sehingga membuat bersemangat tinggi dalam bekerja.

2. Prinsip Persamaan (*Equality*)

Hakikat manusia menghendaki ada persamaan antara manusia satu dengan lainnya. Setiap manusia yang lahir di bumi memiliki hak dan kewajiban masing-masing pada dasarnya sama atau sederajat.

3. Prinsip Kebaikan (*Goodness*)

Kebajikan secara umum berarti sifat atau karakteristik dari sesuatu yang menimbulkan pujian. Perkataan baik mengandung sifat seperti persetujuan, pujian, keunggulan, kekaguman atau ketepatan. Prinsip ini sangat erat dengan hasrat dan cita manusia. Apabila prinsip kebaikan diterapkan dalam pemerintahan tujuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik pada

dasarnya untuk menciptakan kebaikan, dan perbaikan bagi warga negara.

4. Prinsip Keadilan (*Justice*)

Prinsip ini tertuata yang masih relevan dari zaman Romawi Kuno yaitu *justitia est contacta et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi* (keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya).

5. Prinsip Kebebasan (*Liberty*)

Kebebasan dapat dirumuskan sebagai keleluasaan untuk bertindak atau tidak bertindak berdasarkan pilihan yang tersedia bagi seseorang.

Kebebasan manusia mengandung pengertian:

- a. Kemampuan untuk menentukan sendiri
- b. Kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan.
- c. Syarat-syarat yang memungkinkan manusia untuk melaksanakan pilihannya beserta konsekuensi dari pilihan itu.

6. Prinsip Kebenaran (*Truth*)

Ide kebenaran biasanya dipakai dalam pembicaraan logika ilmiah sehingga mengenal kriteria kebenaran dalam berbagai cabang ilmu (matematika, fisika, biologi sejarah, filsafat). Tetapi ada kebenaran mutlak yang dapat dibuktikan dengan keyakinan bukan dengan fakta yang ditelaah oleh teologi dan ilmu agama. Kebenaran harus dapat dibuktikan dan ditunjukkan kepada masyarakat agar masyarakat merasa yakin akan kebenaran, maka

DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

perlu dijabatani antara kebenaran dalam pemikiran dengan kebenaran kenyataan atau terbukti.

Etika administrasi negara dari American Society for Public Administrator mengisyaratkan bahwasanya prinsip etika yang selanjutnya menjadi asas-asas etika dituangkan dalam sebuah kode etika untuk dipahami dan dijalankan para anggota perhimpunan yang dikemukakan oleh (Gie,1988) dalam Agus H sebagai berikut:

- a. Menunjukkan ukuran baku tertinggi tentang keutuhan watak pribadi kebenaran, kejujuran, dan ketabahan dalam semua kegiatan umum agar membangkitkan keyakinan dan kepercayaan rakyat terhadap pranata negara.
- b. Menghindari suatu kepentingan atau kegiatan yang berada dalam pertentangan dengan penuaian dari kewajiban resmi.
- c. Mendukung, melaksanakan, dan memajukan penempatan tenaga kerja menurut penilaian kecakapan serta tata cara tindakan yang tidak membeda-bedakan guna menjamin kesempatan yang sama pada penerimaan, pemilikan, kenaikan pangkat terhadap orang-orang yang memenuhi syarat dari segenap unsur masyarakat.
- d. Menghapuskan semua pembedaan tidak sah, kecurangan dan salah pengurusan keuangan negara serta mendukung rekan-rekan bila berada kesulitan karena usaha bertanggung jawab untuk memperbaiki pembedaan, kecurangan, salah urus, atau salah penggunaan.
- e. Melayani masyarakat secara hormat, penuh perhatian,

sopan, dan tanggap mengakui bahwa pelayanan kepada masyarakat adalah di atas pelayanan terhadap diri sendiri.

- f. Berjuang ke arah keunggulan berkeahlian perseorangan dan menganjurkan pengembangan berkeahlian serta termasuk yang berusaha memasuki bidang administrasi negara
- g. Menghampiri tugas organisasi dan kewajiban-kewajiban kerja dengan suatu sikap yang positif dan membangun tata hubungan yang terbuka, daya cipta serta pengabdian.
- h. Menghormati dan melindungi keterangan berdasarkan hak-hak istimewa yang dapat diperoleh dalam pelaksanaan kewajiban resmi.
- i. Menjalankan wewenang kebijaksanaan apa pun yang dimiliki menurut hukum untuk memajukan kepentingan umum dan masyarakat.
- j. Menerima sebagai suatu kewajiban pribadi tanggung jawab mengikuti perkembangan baru terhadap permasalahan yang muncul dan menangani urusan masyarakat dengan kecakapan, keahlian, kelayakan, sikap tidak memihak, efisiensi dan daya guna.
- k. Menghormati, mendukung, menelaah dan bilamana perlu berusaha menyempurnakan konstitusi negara serikat dan negara bagian serta hukum-hukum lainnya yang mengatur hubungan di antara badan pemerintah, pegawai, nasabah dan semua warga negara.

Untuk etika dalam administrasi publik bukanlah

DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

konsep baru. Sejak zaman kuno, para pemimpin dan pemikir telah menyadari pentingnya moralitas dan etika dalam menjalankan pemerintahan. Namun, pemahaman dan penerapan etika dalam administrasi publik terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan kompleksitas masalah pemerintahan.

Periode Kuno

1. Filsuf Yunani: Filsuf seperti Plato dan Aristoteles telah membahas konsep keadilan, kebaikan, dan kewajiban warga negara dalam pemerintahan. Mereka menekankan pentingnya pemimpin yang memiliki integritas dan bertindak demi kepentingan umum.
2. Konfusianisme: Dalam filsafat Konfusianisme, terdapat konsep tentang pemerintahan yang baik dan bijaksana. Seorang pemimpin yang ideal harus memiliki moralitas yang tinggi, mengutamakan kepentingan rakyat, dan menjadi teladan bagi rakyatnya.

Periode Abad Pertengahan

Teori Hukum Alam: Konsep hukum alam yang berasal dari filsafat Yunani Kuno terus berkembang pada masa ini. Hukum alam dianggap sebagai hukum yang universal dan abadi, yang berasal dari Tuhan atau alam semesta. Hukum alam menjadi dasar bagi pengembangan norma-norma moral dan etika dalam pemerintahan.

Periode Modern

1. Reformasi Birokrasi: Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, terjadi reformasi birokrasi di berbagai negara. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien, profesional, dan akuntabel. Salah satu

aspek penting dalam reformasi ini adalah penegakan etika dalam pelayanan publik.

2. Teori Birokrasi Weber: Max Weber, seorang sosiolog Jerman, mengembangkan teori birokrasi yang ideal. Dalam teorinya, Weber menekankan pentingnya aturan, prosedur, dan hierarki dalam organisasi birokrasi. Namun, ia juga menyadari pentingnya nilai-nilai etika dalam menjalankan birokrasi.
3. Pasca Perang Dunia II: Setelah Perang Dunia II, muncul kesadaran global tentang pentingnya pemerintahan yang bersih dan transparan. Hal ini mendorong perkembangan studi tentang etika dalam administrasi publik.

Perkembangan Kontemporer

1. Globalisasi dan Multikulturalisme: Globalisasi dan multikulturalisme membawa tantangan baru bagi etika administrasi publik. Perbedaan budaya dan nilai-nilai membuat penerapan prinsip-prinsip etika menjadi lebih kompleks.
2. Teknologi Informasi: Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam menjalankan pemerintahan, namun juga menimbulkan tantangan baru seperti privasi data, keamanan informasi, dan etika dalam pemanfaatan teknologi.
3. *Good Governance*: Konsep *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) menjadi acuan dalam menilai kinerja pemerintahan. *Good governance* mencakup aspek-aspek seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum. Etika menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan *good governance*.

DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

Perkembangan kontemporer menuju kecenderungan pada saat ini etika publik:

1. Etika Publik: Fokus pada etika dalam pengambilan keputusan publik, kebijakan publik, dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
2. Integritas: Penekanan pada pentingnya integritas dalam pemerintahan, termasuk pencegahan korupsi dan konflik kepentingan.
3. Akuntabilitas: Tuntutan akan akuntabilitas yang lebih tinggi dari para pejabat publik.
4. Partisipasi Masyarakat: Pengakuan akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
5. Etika Lingkungan: Kepedulian terhadap isu-isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Etika administrasi publik telah mengalami perkembangan yang panjang dan kompleks. Dari konsep-konsep filosofis hingga isu-isu kontemporer, etika selalu menjadi bagian integral dari pemerintahan yang baik. Pemahaman yang mendalam tentang sejarah perkembangan etika administrasi publik dapat membantu memahami tantangan dan peluang dalam membangun pemerintahan yang lebih etis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Bab 3

Teori Teori Etika_

BAB III

TEORI-TEORI ETIKA

A. Tokoh-tokoh Etika

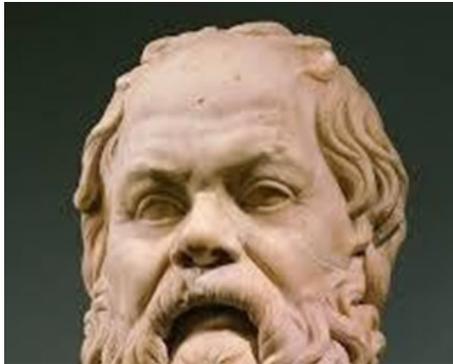
Mempelajari etika tidak lepas dari pembahasan pandangan para ahli filosofi maupun ahli etika dalam penerapan teori etika bagi kehidupan manusia.

Teori-teori etika mempunyai beberapa pendapat pandangan oleh penemunya mengikuti perkembangan kebudayaan manusia.

Tokoh-tokoh Etika dari Masa Lalu

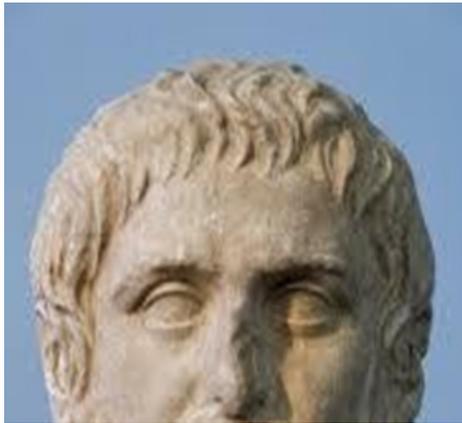
1. Socrates (Yunani Kuno)

- a. Dikenal dengan metode pengajarannya yang unik, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis.
- b. Socrates menekankan pentingnya pengetahuan tentang kebaikan untuk mencapai kebahagiaan sejati.



2. Plato (Yunani Kuno)

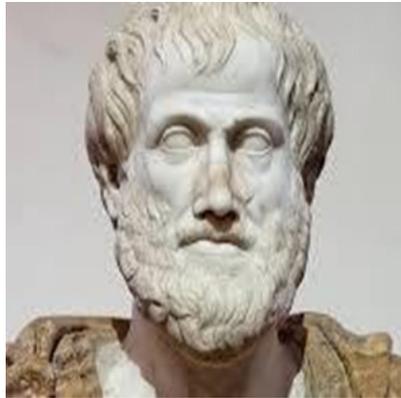
- a. Murid Socrates, Plato mengembangkan teori tentang bentuk-bentuk ideal, termasuk bentuk ideal kebaikan.
- b. Ia juga mendirikan Akademi, salah satu lembaga pendidikan tinggi pertama di dunia.



3. Aristoteles (Yunani Kuno)

- a. Murid Plato, Aristoteles mengembangkan etika berbasis pada sifat-sifat karakter manusia.
- b. Ia menekankan pentingnya eudaimonia (kebahagiaan sejati) yang dicapai melalui tindakan yang bermoral.

DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK



4. Immanuel Kant (Jerman)

- a. Seorang filsuf pencerahan yang terkenal dengan etika kategoris imperatifnya.
- b. Kant berpendapat bahwa tindakan moral harus didasarkan pada kewajiban moral yang universal.



5. John Stuart Mill (Inggris)

Seorang utilitarian yang berpendapat bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang memaksimalkan kebahagiaan bagi jumlah orang terbesar.



Tokoh-tokoh Etika Kontemporer

1. Jean-Paul Sartre (Prancis)

- a. Seorang eksistensialis yang menekankan kebebasan manusia untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya.
- b. Sartre berpendapat bahwa tidak ada nilai moral yang universal dan setiap individu harus menciptakan nilai-nilai moralnya sendiri.



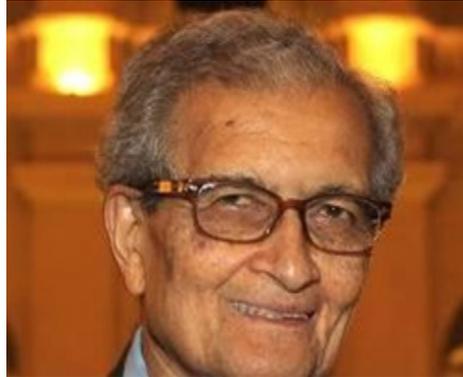
2. Amartya Sen (India):

- a. Seorang ekonom dan filsuf moral yang terkenal dengan konsep kapabilitas.
- b. Sen berpendapat bahwa keadilan sosial harus diukur berdasarkan kemampuan individu untuk mencapai kehidupan yang mereka nilai berharga.

DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

3. Alasdair MacIntyre (Skotlandia):

- a. Seorang filsuf moral yang menekankan pentingnya tradisi dan komunitas dalam membentuk etika.
- b. MacIntyre mengkritik etika modern yang dianggapnya terlalu individualistis.



Tokoh-tokoh Etika dari Indonesia

1. Franz Magnis-Suseno:

- a. Seorang filsuf Indonesia yang banyak berkontribusi dalam pengembangan pemikiran etika di Indonesia.
- b. Ia menggabungkan filsafat Barat dengan nilai-nilai budaya Indonesia.



B. Teori-teori Etika

Teori etika adalah kerangka pemikiran yang berusaha menjelaskan apa yang dianggap baik dan buruk, benar dan salah dalam tindakan manusia. Ada banyak teori etika yang berkembang sepanjang sejarah, namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori utama.

Kategori Utama Teori Etika

1. Teori Etika Teleologis (Konsekuensialisme):
 - a. Etika Utilitarianisme: Berfokus pada konsekuensi atau hasil akhir dari suatu tindakan. Tindakan dianggap benar jika menghasilkan kebahagiaan atau manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Tokoh utama: Jeremy Bentham dan John Stuart Mill.
 - b. Etika Egoisme: Menempatkan kepentingan diri sendiri sebagai tujuan utama. Tindakan dianggap benar jika menguntungkan diri sendiri.
2. Teori Etika Deontologis:
 - a. Etika Kantian: Berdasarkan pada kewajiban moral yang universal dan mutlak. Tindakan dianggap benar jika sesuai dengan hukum moral yang rasional. Tokoh utama: Immanuel Kant.
 - b. Etika Hak Asasi Manusia: Menekankan pentingnya hak-hak dasar manusia yang melekat sejak lahir dan tidak dapat dicabut.
3. Teori Etika Keutamaan:
 - a. Etika Aristoteles: Berfokus pada pengembangan karakter atau keutamaan moral. Tindakan dianggap benar jika dilakukan oleh orang yang memiliki karakter baik.

DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

- b. Etika Konfusianisme: Menekankan pentingnya harmoni sosial, kesopanan, dan penghormatan terhadap hierarki sosial.

Perbandingan dalam Teori Etika

Teori Etika	Fokus Utama	Contoh
Utilitarianisme	Konsekuensi (kebahagiaan terbesar)	Membantu orang yang membutuhkan untuk memaksimalkan kebahagiaan bersama.
Kantianisme	Kewajiban moral	Selalu jujur, meskipun itu merugikan diri sendiri.
Etika Keutamaan	Karakter individu	Bersikap adil, berani, bijaksana.

Contoh Penerapan dalam Kehidupan Sehari-hari

1. Utilitarianisme: Memilih untuk mendonasikan uang ke organisasi amal yang paling efektif dalam mengurangi kemiskinan.
2. Kantianisme: Menjaga janji, meskipun itu sulit.
3. Etika Keutamaan: Bersikap sabar dan memaafkan ketika dihadapkan pada situasi yang sulit.

Tantangan dalam teori etika yang sering dihadapi yaitu:

1. Konflik nilai dimana terkadang, nilai-nilai yang berbeda dapat saling bertentangan.
2. Relativisme moral yang menimbulkan apakah ada kebenaran moral yang objektif atau semua nilai bersifat relatif?
3. Konsekuensi yang tidak terduga sehingga sulit untuk memprediksi semua konsekuensi dari suatu tindakan.

Pemahaman berbagai teori etika dapat membantu untuk:

1. Membuat keputusan moral yang lebih baik yaitu dengan memahami berbagai perspektif dapat menimbang berbagai pilihan secara lebih komprehensif.
2. Menghargai perbedaan pendapat yang dengan memahami bahwa orang yang berbeda dapat memiliki pandangan moral yang berbeda.
3. Membangun masyarakat yang lebih baik dengan menerapkan prinsip-prinsip etika menyebabkan dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan beradab.

Cabang-cabang Teori Etika

Secara garis besar, teori etika dapat dibagi menjadi beberapa cabang utama sebagai berikut:

1. Metaetika
 - a. Fokus: Menyelidiki asal-usul, makna, dan sifat dari penilaian moral.
 - b. Pertanyaan: Apa itu kebaikan? Bagaimana kita tahu sesuatu itu benar? Apakah moralitas bersifat objektif atau subjektif?
 - c. Contoh: Realisme moral (ada kebenaran moral yang objektif), anti-realisme moral (tidak ada kebenaran moral yang objektif), emotivisme (pernyataan moral hanyalah ekspresi emosi).
2. Etika Normatif
 - a. Fokus: Menentukan prinsip-prinsip moral yang seharusnya diikuti.

DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

- b. Pertanyaan: Tindakan seperti apa yang benar? Bagaimana kita seharusnya hidup?
 - c. Contoh: Utilitarianisme, Kantianisme, Etika Keutamaan.
3. Etika Terapan
- a. Fokus: Menerapkan prinsip-prinsip etika pada masalah-masalah moral yang konkret.
 - b. Contoh: Etika bisnis, etika medis, etika lingkungan.

Cabang-cabang teori etika lainnya yang lebih spesifik, seperti:

1. Etika Deskriptif: Mempelajari bagaimana orang sebenarnya berperilaku dan apa yang mereka anggap sebagai benar atau salah.
2. Etika Sosial: Mempelajari etika dalam konteks masyarakat, seperti etika politik, etika hukum, dan etika sosial.
3. Etika Individual: Mempelajari etika yang berkaitan dengan individu, seperti etika pribadi dan etika profesional.

Contoh Penerapan dalam Kehidupan Sehari-hari

1. Metaetika: Seorang filsuf yang memperdebatkan apakah altruisme (tindakan tanpa pamrih) benar-benar ada atau hanya ilusi.
2. Etika Normatif: Seorang dokter yang harus memutuskan apakah akan memberikan perawatan yang mahal kepada pasien yang sekarat.
3. Etika Terapan: Seorang pengusaha yang dihadapkan pada dilema etis terkait dengan praktik bisnis yang tidak etis.

Suatu pertanyaan mengapa mempelajari cabang-cabang teori etika? Diharapkan dengan memahami berbagai cabang teori etika, dapat:

1. Memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang moralitas.
2. Mampu menganalisis masalah-masalah etis dengan lebih baik.
3. Membuat keputusan moral yang lebih bijaksana.
4. Berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik.

Etika Normatif: Berfokus pada apa yang seharusnya dilakukan manusia. Cabang ini membahas tentang nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etika yang menjadi pedoman bagi manusia dalam bertindak.

Etika Meta-Etika: Berfokus pada makna dan sifat moralitas. Cabang ini membahas tentang pertanyaan-pertanyaan seperti: Apa itu moralitas? Apa yang membuat sesuatu menjadi benar atau salah?

Etika Terapan: Menerapkan prinsip-prinsip etika pada bidang-bidang tertentu, seperti etika bisnis, etika medis, dan etika lingkungan.

C. Etika Administrasi Publik

Dalam buku Harbani P dikatakan etika merupakan bagian dari filsafat, nilai dan moral bersifat abstrak dan berkenaan dengan persoalan baik dan buruk. Sedang dalam administrasi publik bersifat konkret dan harus mewujudkan apa yang diinginkan publik. Dan hal ini menimbulkan masalah bagaimana menghubungkan gagasan administrasi

DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

(keteraturan, efisiensi, kemanfaatan, kinerja) dapat diterapkan etika dalam prakteknya mewujudkan yang baik dan menghindari yang buruk dalam melaksanakan sebagai administrator.

Menurut Chandler dan Palno (1988) dalam Pasalong terdapat empat aliran etika utama yaitu:

1. *Empirical theory* yaitu etika diturunkan dari pengalaman manusia dan persetujuan umum misal penggunaan senjata kimia penilaian baik dan buruk tidak terlepas atau terpisahkan dari fakta dan perbuatan dirasakan.
2. *Rational theory* yaitu bahwa baik atau buruk sangat tergantung dari *rationing* atau alasan dan logika yang melatarbelakangi suatu perbuatan bukan pengalaman
3. *Intuitive theory* berasumsi bahwa etika tidak harus berasal dari pengalaman dan logika tetapi dari manusia secara alamiah memiliki pemahaman tentang apa yang benar dan salah baik dan buruk. Menggunakan hukum moral atau *natural moral law*.
4. *Relevation theory* berasumsi bahwa yang benar atau salah berasal dari kekuasaan di atas manusia (dari Tuhan). Dapat dikatakan Tuhan (dalam berbagai kitab suci) menjadi rujukan utama untuk memutuskan apa yang benar dan salah.

Etika administrasi publik adalah cabang dari etika yang khusus membahas tentang standar moral dan perilaku yang seharusnya dianut oleh para pegawai negeri atau mereka yang bekerja di sektor publik. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengambilan keputusan, penggunaan kekuasaan, hingga pelayanan publik.

Mengapa etika penting dalam administrasi publik?

1. Akuntabilitas: Menjamin bahwa pejabat publik bertanggung jawab atas tindakannya.
2. Transparansi: Memastikan bahwa keputusan dan tindakan pemerintah dapat diakses dan dipahami oleh publik.
3. Keadilan: Menjamin bahwa semua warga negara diperlakukan secara adil dan setara.
4. Efisiensi: Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya publik.
5. Legitimasi: Memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Teori-teori yang Mendukung Etika Administrasi Publik

Beberapa teori etika yang relevan dengan administrasi publik antara lain:

1. Utilitarianisme: Tindakan yang benar adalah yang memaksimalkan kebahagiaan bagi jumlah orang terbesar. Dalam konteks administrasi publik, ini berarti kebijakan publik harus dirancang untuk memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat.
2. Kantianisme: Tindakan yang benar adalah yang didasarkan pada kewajiban moral yang universal. Dalam konteks administrasi publik, ini berarti pejabat publik harus bertindak berdasarkan prinsip-prinsip moral yang berlaku untuk semua orang.
3. Etika Keutamaan: Fokus pada pengembangan karakter individu. Pejabat publik harus memiliki karakter yang baik, seperti kejujuran, integritas, dan keberanian.

DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

4. Etika Keadilan: Menekankan pada keadilan dalam distribusi sumber daya dan peluang. Setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.
5. Etika Hak Asasi Manusia: Mengakui dan menghormati hak-hak dasar setiap individu. Pejabat publik harus melindungi dan mempromosikan hak-hak asasi manusia.

Penerapan Etika dalam Administrasi Publik

Etika administrasi publik diterapkan dalam berbagai aspek, seperti:

1. Kode Etik: Banyak lembaga pemerintahan memiliki kode etik yang mengatur perilaku para pegawainya.
2. Pengambilan Keputusan: Pejabat publik harus mempertimbangkan implikasi etis dari setiap keputusan yang diambil.
3. Pelayanan Publik: Pelayanan publik harus dilakukan dengan profesional, sopan, dan tidak diskriminatif.
4. Pengelolaan Keuangan Negara: Penggunaan anggaran negara harus transparan dan akuntabel.
5. Pengadaan Barang dan Jasa: Proses pengadaan harus bebas dari korupsi dan nepotisme.

Tantangan dalam Menerapkan Etika Administrasi Publik

1. Tekanan Politik: Tekanan politik dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang seharusnya didasarkan pada pertimbangan etis.
2. Korupsi: Korupsi merupakan ancaman serius bagi etika administrasi publik.

3. Bentrokan Kepentingan: Pejabat publik sering kali dihadapkan pada konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik.

Pentingnya Pendidikan Etika

Pendidikan etika sangat penting bagi para pegawai negeri. Pendidikan ini dapat membantu mereka:

1. Memahami nilai-nilai etika.
2. Mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis tentang masalah-masalah etis.
3. Membuat keputusan yang etis dalam situasi yang kompleks.

Etika administrasi publik merupakan fondasi yang kuat untuk membangun pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Etika dalam Kehidupan Sehari-hari

Etika penting dalam semua aspek kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan pribadi, profesional, dan sosial. Etika membantu kita untuk:

1. Membuat keputusan yang bertanggung jawab dan adil
2. Membangun hubungan yang baik dengan orang lain
3. Menciptakan masyarakat yang lebih baik.

Penerapan Etika dalam Berbagai Bidang

Etika diterapkan dalam berbagai bidang, seperti:

1. Bisnis: Etika bisnis mengatur tentang bagaimana perusahaan dan individu harus berperilaku dalam dunia bisnis.

DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

2. **Medis:** Etika medis mengatur tentang bagaimana dokter dan tenaga kesehatan lainnya harus berperilaku dalam merawat pasien.
3. **Lingkungan:** Etika lingkungan mengatur tentang bagaimana manusia harus berperilaku terhadap alam dan lingkungan hidup.

Tantangan dalam Menerapkan Etika

Ada beberapa tantangan dalam menerapkan etika, seperti:

1. **Konflik kepentingan:** Situasi di mana kepentingan pribadi seseorang bertentangan dengan kepentingan orang lain atau dengan kepentingan umum.
2. **Tekanan sosial:** Tekanan dari orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak etis.
3. **Kurangnya pengetahuan tentang etika:** Kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etika.

Pentingnya Mempelajari Etika

1. Mengembangkan karakter dan kebajikan moral
2. Membuat keputusan yang bertanggung jawab dan adil
3. Membangun hubungan yang baik dengan orang lain
4. Menciptakan masyarakat yang lebih baik.

Bab 4

Nilai Nilai Dasar Etika Administrasi Publik_

BAB IV

NILAI-NILAI DASAR ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK

A. Dasar-dasar Etika

Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai moral dan bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan manusia. Etika membantu kita untuk membedakan antara benar dan salah, baik dan buruk, serta untuk bertindak dengan cara yang bertanggung jawab dan adil. Beberapa dasar-dasar etika yaitu:

1. Nilai-nilai Moral

Nilai-nilai moral adalah prinsip-prinsip yang dianggap penting oleh suatu masyarakat. Nilai-nilai moral ini dapat bervariasi dari satu masyarakat ke masyarakat lain, tetapi beberapa nilai moral universal seperti:

- a. Keadilan: Bersikap adil dan tidak memihak kepada siapa pun.
- b. Kejujuran: Berkata dan bertindak dengan benar dan tidak berbohong.

- c. Kebaikan: Melakukan tindakan yang bermanfaat bagi orang lain.
 - d. Hormat: Menghormati hak dan martabat orang lain.
 - e. Tanggung jawab: Bertanggung jawab atas tindakan dan perkataan kita.
2. Prinsip-prinsip Etika
- Prinsip-prinsip etika adalah pedoman yang membantu kita untuk membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit yang umum digunakan yaitu:
- a. Utilitarianisme: Melakukan tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbesar.
 - b. Deontologi: Melakukan tindakan yang sesuai dengan kewajiban dan tugas kita.
 - c. Kebajikan: Melakukan tindakan yang mencerminkan karakter yang baik.
3. Dilema Etika
- Dilema etika adalah situasi di mana kita dihadapkan dengan dua pilihan yang sama-sama tidak ideal. Dalam situasi ini, perlu mempertimbangkan semua pilihan dengan hati-hati dan memilih pilihan yang paling etis.
4. Pentingnya Etika
- Etika penting dalam semua aspek kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan pribadi, profesional, dan sosial yang membantu untuk:
- a. Membuat keputusan yang bertanggung jawab dan adil
 - b. Membangun hubungan yang baik dengan orang lain

DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

c. Menciptakan masyarakat yang lebih baik.

B. Etika, Etiket, Kode Etik, Hukum

Perbedaan etika, etiket, kode etik, hukum menurut Rosady Ruslan dalam Tri Prasetyowati,33-34 sebagai berikut:

No.	Bidang	Sifat	Tujuan	Sanksi
1.	Etika	Baik / buruk nilai universal, moral	a. Mengatur perilaku b. Berakhlak baik	a. Tidak ada b. Amoral
2.	Etiket	Sopan santun	a. Tata karma pergaulan, b. Formal	a. Tidak ada b. Tidak sopan
3..	Kode Etik	Etika dan internal profesi (<i>self-imposed</i>)	a. Tata tertib b. Memelihara perilaku profesional	a. Teguran tertulis/lisan b. Skorsing c. Pemecatan
4.	Hukum	Hukum publik	a. Menjaga ketertiban b. Keadilan umum	a. Hukum perdata b. Hukum pidana
5.	Disiplin	Pengaturan umum	Ketertiban individual dan organisasi	a. Teguran lisan/ tertulis b. Skorsing c. Pemecatan d. Pembubaran e. Pelarangan

Perbedaan Etika dan Etiket dalam Tri Prasetijowati, 36-37

No	Perbedaan	
	Etika	Etiket
1.	Tidak terbata pada cara dilakukan suatu perbuatan atau pilihan (Boleh/Tidak)	Menyangkut cara untuk melakukan perbuatan harus dilakukan manusia/ menunjukkan cara yang tepat
2.	Berlaku dimana saja dan kapan saja meskipun tidak ada sanksi	Hanya berlaku dalam pergaulan pada suatu kelompok
3.	Bersifat absolut prinsip tidak dapat dilawan dan harus dilakukan	Bersifat relatif, berhubungan dengan suatu kebudayaan
4.	a. Menyangkut manusia dari segi rohaninya, b. Seseorang bersikap sis: orang yang sungguh-sungguh baik. c. Nilai moralnya sudah terinternalisasi dalam hati nuraninya	Memandang manusia dari segi lahiriahnya saja

C. Budi Pekerti

Budi pekerti adalah tanggung jawab orang tua, sekolah, dan masyarakat dan memerlukan keteladanan. Tolok ukur seorang dikatakan baik atau tidak baik dapat diukur dengan alat bantu dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Tolok Ukur 3 M

No.	Tolok ukur	Alat bantu
1.	Mirage	Bersifat fisik-jasmaniah
2.	Mirasa	Jalan pikiran termasuk cara bicara

DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

No.	Tolok ukur	Alat bantu
3.	Mirama	Hal-hal yang mengandung unsur gerak, (Cara berjalan, duduk, makan, tertawa, yang semuanya menggambarkan watak dari kecenderungan perilaku. Seorang terpuji atau tercela dapat berasal usul dari hasil apa yang dilakukan, dilanjutkan, diucapkan, dan apa yang dipikirkan)

Manusia bersifat khilaf Joko 8,136 maka pendidikan budi pekerti dan disiplin harus dilaksanakan berkelanjutan tidak terlalu otoriter tetapi moderat autotatif (fleksibel) namun perlu tegas karena pendidikan tanpa disiplin akan menghasilkan manusia manja (Tri P,55)

Etika adalah bagian penting dari kehidupan manusia. Mempelajari etika penting untuk mengembangkan karakter dan kebajikan moral, membuat keputusan yang bertanggung jawab dan adil, membangun hubungan yang baik dengan orang lain, dan menciptakan masyarakat yang lebih baik.

Aliran Etika (ukuran baik) dari Prof.I.R.Poedjawijatna dalam Moekijat disebut dengan kebaikan kodrati karena diadakan dalam persesuaian dengan kodratnya sedang kebaikan berdasarkan wahyu disebut kebaikan adi kodrati sebagai berikut:

1. Hedonisme

Yaitu tindakan yang baik adalah tindakan yang mengandung kenikmatan dan perasaan puas, dimana rasa puas sama dengan bahagia.

2. Utilitarisme

Yaitu tindakan yang baik adalah tindakan yang berguna untuk mencapai tujuan (utilis = berguna). Contoh

dalam politik: apa saja fitnah, khianat, bohong, kekerasan dan paksaan boleh dilakukan (baik) asal berguna untuk mencapai tujuan.

3. Vitalisme

Yaitu tindakan yang baik adalah tindakan yang mencerminkan kekuatan dalam hidup manusia yang berkuasa itulah manusia yang baik. Apa saja yang dilakukan orang kuat dijadikan pedoman untuk rakyat dan orang banyak.

4. Sosialisme

Yaitu tindakan yang baik adalah tindakan yang ditentukan oleh masyarakat. Apa yang lazim dianggap baik oleh masyarakat tertentu itu baik.

5. Religiosisme

Yaitu tindakan yang baik adalah tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. yang baik adalah ukuran yang umum dan obyektif.

6. Humanism

Yaitu tindakan yang baik adalah tindakan yang sesuai dengan kodrat manusia yaitu kemanusiaan yang sesuai dengan derajat manusia jadi tidak mengurangi atau menentang kemanusiaan. Contoh orang makan banyak sekali dengan sengaja mencari kesenangan hingga sakit maka ini sengaja mengurangi derajat kemanusiaannya.

D. Etika Minus, Etika Nol dan Etika Plus

Menurut Algernon D.Black, dalam Moekijat diuraikan yaitu:

1. Etika minus yaitu perintah dan ajaran pada umumnya berawal dengan “jangan”. Tiga perintah “jangan” yang sangat penting adalah:

DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

- a. Jangan membunuh
- b. Jangan mencuri
- c. Jangan bersaksi dusta.

Namun tidak ada seseorang pun ingin selalu diatur dengan jangan begini, jangan begitu. Bila dapat dicegah maka semua orang akan merasa aman masyarakat dan bangsa juga kan lebih sentosa dan bahagia.

2. Etika Nol

Pengambilan jalan tengah tidak berbuat jahat tetapi tidak pula berbuat baik, mengartikan baik sebagai tidak berbuat jahat.

Contoh seorang wanita dirampok dalam bus, orang dalam bis melihat hal tersebut. Ada yang berpikir mau membantu sebaiknya diam, bukan urusannya dan tak mau terlibat, lebih memikirkan urusanku sendiri (begini yang paling aman)

3. Etika Plus

Belum cukup hanya mengatakan tak pernah berbuat jahat, pada hari kiamat harus dapat berkata bahwa terlihat banyak berbuat baik.

Bab 5

Perbandingan Etika_

BAB V

PERBANDINGAN ETIKA

Pembahasan etika dalam bab ini dengan melihat perbandingan etika administrasi publik di Indonesia dengan beberapa negara lain dengan maksud untuk melihat kesamaan, perbedaan, serta pelajaran yang dapat diambil dari praktik-praktik etika di negara lain, baik dari negara maju maupun negara sedang berkembang. Dengan demikian dapat diperoleh perspektif gambaran yang lebih luas tentang etika administrasi publik dan menemukan cara maupun praktik-praktik yang dapat diterapkan di Indonesia.

Tabel 5.1.
Perbandingan Etika di Negara Maju dan Negara Berkembang

Tinjauan dari Aspek Etika	Negara Maju	Negara berkembang
Prinsip Dasar	Transparansi, akuntabilitas, meritokrasi, pelayanan publik yang prima, dan etika pemerintahan yang kuat.	Berfokus pada kepentingan kelompok tertentu, nepotisme, dan kurangnya transparansi.

Tinjauan dari Aspek Etika	Negara Maju	Negara berkembang
Implementasi (standar etika)	Standar etika yang jelas dan terukur, mekanisme pengawasan yang independen, serta sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etika.	Standar etika yang kurang jelas, pengawasan yang lemah, dan sanksi yang tidak konsisten.
Kultur Organisasi	Profesional, berorientasi pada hasil, dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas.	Berlangsung ada dengan praktik-praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).
Peran Masyarakat	Masyarakat berperan aktif berpartisipasi dalam pengawasan pemerintahan dan menuntut akuntabilitas.	Masyarakat berperan cenderung pasif dan kurang terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik.
Teknologi	Penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.	Penggunaan teknologi informasi masih terbatas dan belum optimal.
Pendidikan dan Pelatihan	Program pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas aparatur negara.	Program pendidikan dan pelatihan yang kurang memadai dan tidak berkelanjutan.

Tabel 5.2.

Persamaan Antara Etika di Negara Maju dan Negara Berkembang

Persamaan Etika	Keterangan dari kedua persamaan negara maju dan negara berkembang
Pelayanan Publik	Baik negara maju maupun berkembang memiliki tujuan dasar untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Perbedaannya terletak pada kualitas dan efisiensi pelayanan.

DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

Akuntabilitas	Baik dinegara maju dan negara berkembang mengakui pentingnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang artinya setiap tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan.
Transparansi	Di kedua negara pada prinsip transparansi menjadi landasan umum. Informasi publik harus dapat diakses oleh masyarakat.
Keadilan	Prinsip keadilan dalam penerapan hukum dan kebijakan merupakan nilai universal yang berlaku di semua negara.
Integritas	Para aparatur negara di negara maju maupun berkembang diharapkan memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.
Profesionalisme	Baik negara maju maupun negara berkembang menghargai profesionalisme dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Tujuan Pembangunan	Baik negara maju maupun berkembang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai pembangunan berkelanjutan.

Perbandingan etika administrasi publik di beberapa negara ASEAN. Di mana bahwa setiap negara memiliki nuansa dan konteks yang unik antar negara-negara ASEAN dengan melihat masing-masing sistem pemerintahan, ideologi yang dijalankan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perbedaan:

1. Sejarah: Sejarah kolonialisme, perang, dan konflik internal mempengaruhi sistem pemerintahan.
2. Sistem Politik: Sistem politik yang berbeda (demokrasi, monarki, dan lain-lain) mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pemerintah.

3. Tingkat Pembangunan: Tingkat pembangunan ekonomi mempengaruhi kapasitas negara untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas.
4. Budaya: Nilai-nilai budaya yang berbeda mempengaruhi cara masyarakat berinteraksi dengan pemerintah.

Tabel 5.3.
Perbandingan Etika Administrasi Publik Negara ASEAN

Aspek Etika	Indonesia	Malaysia	Thailand	Singapura	Brunei Darussalam	Filipina	Myanmar
Prinsip Dasar	Pancasila, UUD 1945	Rukun Negara	Filosofi Raja	<u>Meritokrasi</u> , efisiensi	Islam, Melayu, <u>Monarchy</u>	1987 <u>Constitution</u>	Budha, <u>keminatan</u> militer
Implementasi	Variatif antar daerah, masih banyak tantangan korupsi	Berusaha menerapkan sistem <u>meritokrasi</u> , namun masih ada nepotisme	Birokrasi kompleks, pengaruh keluarga kerajaan	Sangat ketat, sanksi berat	Sistem <u>patronage</u> kuat, namun ada upaya reformasi	Masih banyak tantangan korupsi, nepotisme	Dominasi militer, kurang transparansi
Kultur Organisasi	Kultural, hierarkis, masih banyak praktik KKN	Lebih profesional, namun masih ada budaya <u>patronase</u>	Birokrasi kompleks, lambat	Sangat efisien, berorientasi pada hasil	Budaya Melayu yang kolektif, loyalitas tinggi	<u>Familialisme</u> , personalisme	<u>Militeristik</u> , hierarkis
Peran Masyarakat	Mulai aktif, namun masih terbatas	Relatif aktif, terutama dalam pengawasan	Relatif pasif	Sangat aktif, partisipasi tinggi	Terbatas, pengaruh keluarga kerajaan kuat	Aktif, namun sering kali <u>terpolarisasi</u>	Terbatas, pengawasan lemah
Teknologi	Mulai diterapkan, namun belum merata	Cukup baik, <u>e-government</u> sedang berkembang	Sedang berkembang, fokus pada pelayanan publik tertentu	Sangat maju, <u>e-government</u> terintegrasi	Sedang berkembang, fokus pada sektor tertentu	Masih terbatas, infrastruktur kurang memadai	Masih sangat terbatas
Pendidikan dan Pelatihan	Berbagai program, Namun kualitas variatif	Cukup baik, fokus pada pengembangan kompetensi	Berbagai program, namun belum merata	Sangat baik, fokus Pada pengembangan profesionalisme	Tersedia, namun lebih fokus pada sektor tertentu	Berbagai program, namun kualitas bervariasi	Terbatas, fokus pada militer

Perbandingan etika administrasi publik di Indonesia dan etika dinegara Timor Leste. Dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.4.
Perbandingan Etika Administrasi Publik di Indonesia dan di Timor Leste

Aspek Perbandingan	Indonesia	Timor Leste
Konsep Dasar Etika	Berakar dari nilai-nilai Pancasila, agama, dan budaya lokal. Terdapat kode etik ASN yang mengatur perilaku pegawai.	Dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya lokal, agama Katolik, dan pengaruh kolonialisme Portugal. Belum memiliki kode etik ASN yang komprehensif.
Perkembangan Historis	Pengalaman kolonial Belanda, perjuangan kemerdekaan, dan Orde Baru membentuk karakteristik etika administrasi. Transisi ke demokrasi membawa perubahan signifikan.	Pengaruh kolonialisme Portugal, perjuangan kemerdekaan, dan pendudukan Indonesia. Pembangunan negara masih dalam tahap awal.
Pengaruh Budaya	Nilai gotong royong, kolektivisme, dan hierarki mempengaruhi perilaku birokrasi.	Nilai kekeluargaan, adat istiadat, dan pengaruh agama Katolik membentuk karakteristik birokrasi.
Pengaruh Politik	Stabilitas politik yang relatif stabil namun sering terjadi pergantian kekuasaan. Sistem politik yang kompleks dengan banyak partai politik.	Stabilitas politik yang masih rapuh, sistem partai politik yang masih berkembang.

Aspek Perbandingan	Indonesia	Timor Leste
Korupsi	Masih menjadi masalah serius, meskipun telah ada upaya pemberantasan. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) masih rendah.	Masalah korupsi juga menjadi tantangan, namun skala dan intensitasnya mungkin berbeda dengan Indonesia.
Akuntabilitas	Konsep akuntabilitas telah tertuang dalam undang-undang, namun implementasinya masih lemah.	Konsep akuntabilitas masih dalam tahap pengembangan, terutama terkait dengan transparansi dan partisipasi publik.
Pelayanan Publik	Kualitas pelayanan publik bervariasi antar daerah. Terdapat upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui berbagai program reformasi birokrasi.	Kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan, terutama di daerah pedesaan.

Bab 6
Etika Penyelenggara Negara_

BAB VI

ETIKA PENYELENGGARA NEGARA

A. Etika Jabatan

Etika jabatan menurut Djohermansyah Djohan dan Milwan adalah pedoman perbuatan atau tingkah laku pribadi dan kewajiban moral pejabat dalam hubungannya dengan bawahan, sejawat, atasan, dan masyarakat dengan tekanan pada sifat baik dan buruk atau patut dan tidak patut. Pejabat berbuat etis berarti berbuat seperti yang telah diucapkan pada saat diangkat menjadi pejabat. Berbuat etis berarti menepati sumpah atau janji yang pernah diucapkan dan tidak melakukan sesuatu yang akan merusak atau menodai kepercayaan yang telah diberikan masyarakat atau orang lain.

Diketahui para pegawai atau pejabat negara menghadapi beragam situasi yang menguji kejujuran dan etika pribadi dalam profesinya, namun penerapannya sanksi tidak tegas sehingga ikut andil menyebabkan muncul banyak praktik penyelewengan dan korupsi yang meliputi hampir di semua segi praktik pemerintahan terjadi dilembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.

DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

B. Etika Penyelenggara Negara

Menurut Djohermansyah Djohan dan Milwan (2021), etika penyelenggara negara adalah nilai-nilai moral yang menjadi pedoman bagi penyelenggara negara dalam tugas dan kewajibannya. Norma-norma etika penyelenggara negara berkewajiban untuk menjalankan norma-norma etika sebagai berikut:

1. Berakhlak mulia
2. Tepat janji
3. Jujur dan Ikhlas
4. Adil
5. Arif
6. Disiplin
7. Taat hukum
8. Tanggung jawab dan akuntabel
9. Sopan santun
10. Berhati-hatian
11. Kesetaraan.

C. Sanksi Terhadap Pelanggaran Etika Penyelenggara Negara

Sikap, perilaku, tindakan dan ucapan para penyelenggara negara yang dianggap melanggar norma etika penyelenggara negara dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi administratif. Sanksi moral merupakan pemberian hukuman yang ditekankan pada tindakan menyentuh pada tanggung jawab moral dapat terdiri atas sebagai berikut:

1. Pengumuman melalui media massa

2. Kewajiban permintaan maaf ke publik secara terbuka
3. Pengunduran diri dari jabatan atau berhenti sementara dari jabatan struktural, fungsional maupun jabatan lainnya.

Sedangkan, sanksi administratif yang melanggar terdiri dari:

1. Teguran lisan atau tulisan
2. Pemberhentian sementara
3. Pemberhentian tidak dengan hormat
4. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku (bila pelanggaran mengandung unsur tindak pidana atau perdata dapat diajukan untuk dikenakan tuntutan tindak pidana atau gugatan perdata).

D. Etika Profesi

1. Definisi Profesi

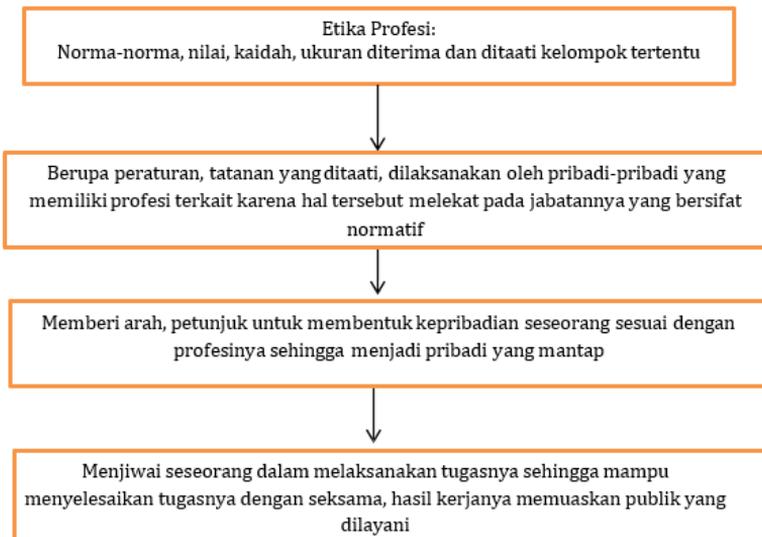
Profesi berasal dari bahasa latin yaitu *Profesessues* berarti suatu kegiatan atau pekerjaan yang semula dihubungkan dengan sumpah dan janji bersifat religius (Rismawaty, 2008).

Dalam M. Yatimin (683) Profesi adalah suatu masyarakat etika (*moral community*) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Pemakaian istilah profesi memiliki ikatan batin dengan pekerjaannya merupakan keahlian khusus dalam pekerjaannya, Jika melakukan pelanggaran sumpah terhadap profesi sama dengan pelanggaran sumpah jabatan yang dianggap telah menodai kesesuaian profesinya.

DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

2. Etika Profesi (Wildan, Bambang; 2018)

Istilah Profesi berasal dari bahasa Inggris '*Profession*' dan bahasa latin '*Profecus*' berarti mengakui, adanya pengakuan atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Namun dalam kehidupan sehari-hari istilah profesi dirancukan dengan istilah pekerjaan Profesi dapat digambarkan secara sistematis menurut St. Maria. Assumta. R.OSF dalam Tri Prasetijowati (2021.h.58) sebagai berikut:



3. Bidang Profesi

Bidang profesi terdiri dari dua jenis:

a. Profesi khusus yaitu:

- 1) Para profesional yang melaksanakan profesi secara khusus untuk mendapatkan nafkah atau penghasilan tertentu sebagai tujuan pokoknya. Bidang-bidang profesinya profesi bidang ekonomi,

bidang politik, bidang hukum, bidang kedokteran, bidang pendidikan, bidang teknik, bidang humas , bidang jasa konsultan.

- 2) Profesi luhur yaitu para profesional melaksanakan profesinya tidak lagi untuk mendapatkan nafkah sebagai tujuan utamanya tetapi sudah merupakan dedikasi atau sebagai jiwa pengabdian sematamata, yakni bidang keagamaan, sosial, pendidikan, budaya, seni.
- b. Para profesional melaksanakan profesinya dengan ciri-ciri sebagai berikut:
- 1) Memiliki *skill* atau kemampuan, pengetahuan tinggi yang tidak dipunyai orang umum lain diperoleh dari pendidikan/pelatihan perilaku ke dalam dan pengalaman
 - 2) Mempunyai kode etik dan merupakan standar moral bagi setiap profesi dituangkan secara formal, tertulis dan normatif dalam suatu bentuk aturan main dan perilaku ke dalam kode etik
 - 3) Memiliki tanggung jawab profesi (*responsibility*) dan integritas pribadi tinggi terhadap diri sendiri, lembaga. pemerintah/swasta, penggunaan media massa/*online* serta menjaga martabat bangsa dan negara
 - 4) Memiliki jiwa pengabdian kepada publik atau masyarakat dan penuh dedikasi profesi yang disandangnya.

DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

- 5) Otonomisasi organisasional yaitu memiliki kemampuan manajemen, perencanaan program kerja, strategi, mandiri, dapat bekerja sama dengan pihak terkait dan memiliki standar dan etos kerja profesional tinggi
- 6) Menjadi anggota salah satu organisasi profesi sebagai wadah untuk menjaga eksistensi, mempertahankan kehormatan dan menertibkan perilaku sebagai tolak ukur agar tidak dilanggar.

4. Prinsip-prinsip Etika Profesi

Menurut Keraf (1993) dalam Rismawaty prinsip-prinsip etika profesi antara lain:

- a. Tanggung jawab pada hasil dan dampak yang ditimbulkan antara lain tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan (*by function*) dan tanggung jawab terhadap dampak atau akibat dari tindakan dari pelaksanaan profesi harus berbuat baik dan tidak untuk berbuat sesuatu kejahatan.
- b. Kebebasan menjalankan profesi tanpa merasa takut atau ragu-ragu tetapi berkomitmen, tanggung jawab sesuai dalam kode etik
- c. Kejujuran melaksanakan profesi dengan jujur, setia, terhormat, tidak sombong, berupaya terus mengembangkan diri melalui pendidikan, pelatihan maupun pengalaman.
- d. Keadilan dalam menjalankan profesional berkewajiban dan tidak dibenarkan melakukan pelanggaran hak atau mengganggu milik orang lain, lembaga/instansi dan mencemarkan nama baik agar tercipta saling

menghormati, keadilan obyektif dalam kehidupan masyarakat.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengembangan profesionalisme:

- a. Pengakuan (pengakuan keberadaan (eksistensi) profesional diakui keberadaannya)
- b. Organisasi (mempunyai manfaat, pelayanan, ide/gagasan kreatif dan inovatif bagi kemajuan organisasi, lembaga/instansi)
- c. Kriteria (berdasarkan standar teknis, kode etik profesi)
- d. Kreatif (mampu mengembangkan ide, gagasan yang cemerlang demi kemajuan diri sendiri maupun organisasi, lembaga, instansi)
- e. Konseptor (memiliki kemampuan membuat atau menciptakan suatu konsep-konsep kerja jangka pendek, jangka panjang dan menciptakan citra positif)

5. Perbedaan Profesi dan Pekerjaan

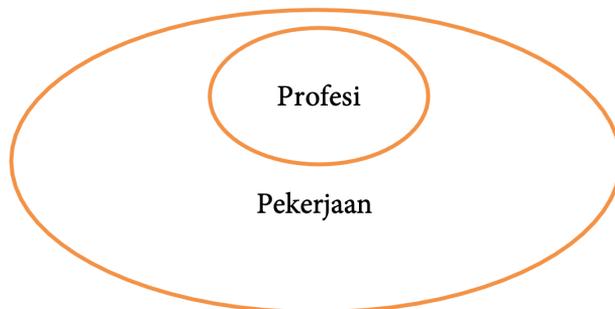
Profesi merupakan pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan. Suatu profesi biasanya terikat dengan tiga hal yaitu:

- a. Kode etik profesi (sebagai prosedur pendisiplinan anggota yang melanggar guna menghindari penyimpangan kode etik yang dapat menurunkan wibawa atau kehormatan profesi)
- b. Asosiasi profesi (organisasi profesi memiliki syarat khusus untuk bisa menjadi anggota)
- c. Mempunyai lisensi (sertifikat profesi terdaftar dalam organisasi profesi)

DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

Pekerjaan ialah suatu kegiatan atau tindakan yang menghasilkan imbalan balik berupa materi maupun non materi dengan istilah kerja bakti untuk pekerjaan yang tidak dibayar dengan materi. Kerja hakikatnya merupakan suatu aktivitas melayani orang atau pihak lain sebaliknya perilaku minta dilayani tidak pantas disebut sebagai kerja.

Profesi dan pekerjaan dapat dikatakan bahwa profesi merupakan bagian dari pekerjaan karena profesi membutuhkan keahlian tersendiri sebagaimana dalam diagram Venn yang menurut Rini Damarsturi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ada suatu profesi yang ditekuni seseorang ketika bekerja hal ini dapat dipahami karena profesi yang dimiliki seseorang merupakan bagian dari pekerjaan dengan gambar diagram Venn di bawah ini (Tri P.59):



6. Etos Kerja

Menurut Geertz, etos adalah sikap yang mendasar terhadap diri dan dunia yang dipancarkan hidup. Etos adalah aspek evaluatif yang bersifat menilai. Persoalan dalam pengertian etos adalah kemungkinan-kemungkinan sumber motivasi seseorang dalam berbuat, apakah pekerjaan terikat pada identitas diri atau (dalam lingkup

empiris) apakah menjadi sumber pendorong partisipasi dalam pembangunan.

Etos juga merupakan landasan ide, cita atau pikiran yang akan menentukan sistem tindakan karena menentukan penilaian-penilaian atas suatu pekerjaan, menentukan hasil-hasilnya, semakin progresif etos kerja suatu masyarakat semakin baik hasil-hasil yang akan di capai baik secara kuantitatif dan kualitatif. Sumber utama etos kerja yang baik adalah keyakinan religius dan terdapat hubungan yang signifikan antara ajaran agama dengan etos kerja suatu masyarakat (Wahyudi K, 2018, h.389–390).

Istilah etos kerja berasal dari kata *ethos* berarti sikap dasar seseorang dalam bidang tertentu. Etos kerja merupakan sikap mental seseorang dalam menghayati dan menghargai pekerjaannya. Etos kerja merupakan seperangkat perilaku positif yang berakar pada kesadaran yang terang, keyakinan mantap, dan komitmen teguh pada sekumpulan prinsip, paradigma dan wawasan kerja yang komprehensif.

Sinamo (2005) dalam Wildan ada delapan elemen etos kerja profesionalisme di kantor sebagai berikut:

- a. Kerja adalah Rahmat (aku bekerja ikhlas penuh syukur)
- b. Kerja adalah amanah (aku bekerja benar penuh tanggung jawab)
- c. Kerja adalah panggilan (aku bekerja tuntas penuh integritas)
- d. Kerja adalah aktualisasi (aku bekerja keras penuh semangat)

DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

- e. Kerja adalah ibadah (aku bekerja serius penuh kecintaan)
- f. Kerja adalah seni (aku bekerja cerdas penuh kreativitas)
- g. Kerja adalah kehormatan (aku bekerja tekun penuh keunggulan)
- h. Kerja adalah pelayanan (aku bekerja penuh kesabaran.

Menurut Wahyudi K, dijelaskan beberapa pedoman bekerja lebih baik yang disarankan Paul Mali adalah:

- a. Selalu memiliki gagasan-gagasan yang lebih baik
- b. Penyelesaian tugas yang lebih baik
- c. Selalu memilik saran dan perbaikan
- d. Selalu bekerja dengan rencana tanpa lupa jadwal waktunya
- e. Selalu berpikiran positif terhadap pekerjaannya
- f. Mampu menjadi anggota kelompok yang baik
- g. Dapat memotivasi dirinya melalui dorongan ke dalam,
- h. Memahami pekerjaan dengan baik
- i. Mau mendengarkan dan menerima ide-ide yang lebih baik dari siapa pun
- j. Mampu bergaul dengan atasan maupun bawahannya
- k. Selalu menyadari akan adanya pemborosan-pemborosan
- l. Selalu mencari insentif baik ekonomis maupun non ekonomis
- m. Selalu menyukai pekerjaan apa pun

- n. Selalu bekerja dengan kecerdikan dan tidak sekedar bekerja keras
- o. Memiliki tingkat kehadiran yang baik
- p. Selalu tabah dan tidak suka mengeluh
- q. Selalu bekerja melebihi standar
- r. Memiliki kebiasaan kerja yang baik
- s. Selalu mencatat prestasi kerjanya untuk dijadikan alat awas diri
- t. Tidak suka terkejut
- u. Selalu dengan cepat mempelajari sesuatu yang baru.

Dari pedoman kerja tersebut di atas apabila dirangkum ada dua pengertian pokok yang perlu diupayakan setiap pejabat atau pegawai pemerintah yaitu pengembangan diri (*self development*) dan peningkatan diri (*self improvement*). Dan telah menjadi fenomena umum bahwa kendala untuk meningkatkan etos kerja dalam organisasi publik ialah kurang mapannya ukuran untuk menilai produktivitas pegawai.

Bab 7
Etika Pelayanan Publik_

BAB VII

ETIKA PELAYANAN PUBLIK

Dalam Undang-undang No,25 tahun 2009 pelayanan publik dikatakan kegiatan atau rangkaian kegiatan pelayanan sebagai dasar pelayanan publik oleh penyelenggara bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Etika dalam pelayanan publik adalah seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang harus dipegang oleh para pelayan publik dalam menjalankan tugasnya. Ini mencakup bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat, mengambil keputusan, dan menggunakan kekuasaan yang diberikan. etika ini menjadi pedoman agar pelayanan publik berjalan dengan baik, adil, dan transparan.

Definisi pelayanan publik menurut Kaerul Ulum merupakan penggunaan nilai-nilai luhur oleh seseorang administrator dalam memberikan pelayanan publik

Konsep etika dalam pelayanan publik menurut Fadillah dalam Kaerul adalah suatu cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan

DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

hukum atau norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik, oleh sebab itu etika memperlakukan baik-buruk, bukan benar salah tentang sikap, tindakan dan perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesama administrasi publiknya baik dalam masyarakat maupun organisasi publik. Berperan penting dalam praktik.

A. Paradigma Etika Pelayanan Publik

Paradigma etika pelayanan publik adalah suatu kerangka berpikir yang mendasari bagaimana seharusnya pelayanan publik dilakukan. Ini mencakup nilai-nilai, prinsip, dan standar perilaku yang menjadi acuan bagi para penyelenggara pelayanan publik dalam menjalankan tugasnya berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan. Dalam paradigma dikotomi politik dan administrasi oleh Wilson dalam Kaerul pemerintah memiliki dua fungsi yang berbeda yaitu fungsi publik yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan berada pada kekuasaan politik atau pernyataan yang menjadi keinginan negara dan fungsi administrasi pelaksana kebijakan politik merupakan kekuasaan administrasi publik yang mana administrasi publik dalam menjalankan kebijakan politik memiliki kewenangan secara umum disebut *discretionary power* keleluasaan untuk menafsirkan suatu kebijakan politik dalam bentuk program dan proyek yang menimbulkan pertanyaan “apakah ada jaminan dalam menjalankan kewenangan secara baik dan tidak secara buruk? Maka atas dasar ini, etika diperlukan dalam administrasi publik dijadikan pedoman, referensi, petunjuk tentang segala sesuatu yang harus dilakukan aparat birokrasi dalam menjalankan kebijakan politik yang juga digunakan sebagai standar penilaian tentang baik buruknya perilaku aparat birokrasi menjalankan kebijakan.

Pelayanan publik profesional adalah pelayanan publik

dicirikan adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah) dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Efektif; lebih mengutamakan pencapaian tujuan dan sasaran
2. Sederhana; prosedur/tata cara pelayanan secara mudah, cepat, tepat tidak berbelit-belit, mudah dipahami, mudah dilaksanakan masyarakat
3. Kejelasan dan kepastian (transparansi) mengenai:
 - a. Prosedur dan tata cara pelayanan
 - b. Persyaratan pelayanan, secara teknis maupun administrasi
 - c. Unit kerja dan/atau pejabat berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan
 - d. Perincian biaya/tarif dan tata cara pembayaran
 - e. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan
4. Keterbukaan; prosedur/tata cara, persyaratan satuan kerja/pejabat penanggung jawab, waktu penyelesaian, perincian biaya, hal-hal lain yang berhubungan proses pelayanan wajib diinformasikan secara termuka agar mudah diketahui dan dipahami masyarakat baik diminta maupun tidak diminta.
5. Efisiensi; Persyaratan pelayanan dibatasi pada hal-hal yang berhubungan proses pelayanan wajib diinformasikan secara termuka agar mudah diketahui dan dipahami masyarakat baik diminta maupun tidak diminta.
 - a. Persyaratan pelayanan dibatasi pada hal-hal berkaitan pencapaian, sasaran pelayanan dengan tetap

DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

memperhatikan keterpaduan antara pelayanan dan produk layanan yang berkaitan

- b. Mencegah pengulangan yang dilayani dengan pemenuhan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain terkait.
6. Ketepatan waktu; pelaksanaan pelayanan masyarakat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
7. Responsif; lebih mengarah pada daya tanggap dan dapat menanggapi hal yang menjadi masalah, kebutuhan dalam aspirasi masyarakat yang dilayani
8. Adaptif; cepat menyesuaikan terhadap tuntutan, keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasa mengalami perkembangan.

Acuan perilaku etika pelayanan publik sesuai Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Adil dan tidak diskriminatif
2. Cermat
3. Santun dan ramah
4. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan berlarut-larut
5. Professional
6. Tidak mempersulit
7. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar
8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi
9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan dengan peraturan perundang-undangan

10. Terbuka dan mengambil langkah tepat untuk menghindari benturan kepentingan
11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas
12. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat
13. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki
14. Sesuai dengan kepantasan
15. Tidak menyimpang dari prosedur.

B. Pendekatan Etika Pelayanan Publik

Menurut Kartasasmita dalam Kaeru Ulum ada dua pendekatan dalam etika pelayanan publik sebagai berikut:

1. Pendekatan teologi

Pada pendekatan ini, etika berdasarkan hal-hal baik dan buruk atau yang seharusnya dilakukan pejabat publik. Dan kaitannya dengan pelayanan publik pendekatan ini misalnya mengukur pencapaian sasaran kebijakan publik misal pertumbuhan ekonomi, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan.

2. Pendekatan Deontologi

Pada pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang harus ditegakkan karena kebenaran yang ada dalam dirinya dan tidak berkaitan dengan akibat atau konsekuensi dari keputusan yang diambil. Dalam pendekatan ini, lebih melihat moral tiap-tiap individu pelayanan publik akan beretika apabila diisi oleh orang-orang.

DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

C. Etika Birokrasi Pelayanan Publik

Dalam praktik administrasi, etika sangat diperlukan sebagai pedoman, referensi, petunjuk tentang segala hal yang dilakukan oleh administrasi publik. Perilaku birokrasi mempengaruhi diri sendiri dan masyarakat yang dilayani. Birokrasi merupakan sebuah sistem yang dalam dirinya terdapat kecenderungan untuk terus berbait baik bagi organisasi atau kewenangannya, perlu menyadarkan diri pada nilai-nilai etika. Maka etika birokrasi memiliki dua fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman, acuan, referensi, bagi administrator negara (birokrasi publik) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dinilai baik dalam organisasi.
2. Sebagai standar penilaian apakah sifat, perilaku dan tindakan birokrasi publik dinilai baik.

Nilai etika birokrasi yang digunakan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai berikut:

1. Efisiensi; tidak boros, sikap, perilaku dan perbuatan baik
2. Membedakan milik pribadi dan milik kantor: milik kantor tidak digunakan untuk kepentingan pribadi
3. Impersonal: siapa pun yang bersalah harus diberi sanksi dan yang berprestasi mendapatkan penghargaan
4. *Merytal system*: nilai ini berkaitan dengan rekrutmen pegawai yang tidak berdasarkan kekerabatan namun sesuai pengetahuan, keterampilan, sikap, kemampuan, dan pengalaman sehingga cakap dan profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

5. *Responsible*: nilai berhubungan dengan pertanggungjawaban birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
6. *Accountable*: nilai merupakan tanggung jawab bersifat obyektif oleh masyarakat karena dapat mempertanggung jawabkan perbuatan, sikap sepak terjang kepada pihak mana kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki berasal serta dapat mewujudkan harapan publik
7. Pelayanan publik profesional dan memberikan kepuasan publik
8. *Responsiveness*: birokrasi publik memiliki daya tanggap terhadap keluhan, masalah dan aspirasi masyarakat dengan cepat dipahami dan berusaha memenuhi serta tidak suka menunda-nunda waktu atau memperpanjang alur pelayanan.

Etika administrasi publik yang dapat digunakan bagi para birokrasi publik dalam menjalankan kewenangannya yaitu *American Society for Administration* (ASPA) (Widodo 2006, 70) dalam Pasalong, (239-240) yaitu:

1. Pelayanan pada masyarakat
2. Tanggung jawab kepada rakyat
3. Harus mengacu pada hukum untuk kepentingan rakyat
4. Manajemen efektif dan efisien
5. Sistem penilaian kecakapan, kesempatan sama, dan asa-asa itikad baik akan didukung, dijalankan dan dikembangkan.

DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

6. Tidak mendahulukan kepentingan pribadi tidak diterima (tidak etis)
7. Menghargai sifat arif dan bijak
8. Hati nurani memegang peranan penting dalam memilih arah tindakan.
9. Para administrator publik tidak hanya terlibat mencegah hal yang tidak etis tetapi juga untuk mengusahakan hal etis melalui pelaksanaan tanggung jawab dengan penuh semangat dan tepat pada waktunya.

Penerapan nilai etika suatu pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi publik dapat dilihat dari baik buruknya sebagai berikut:

1. Efisiensi yaitu para birokrat tidak boros dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat
2. Efektivitas yaitu birokrasi dalam pelayanan publik harus baik (etis) yaitu memenuhi target atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Kualitas layanan yaitu diberikan birokrat kepada publik harus memberikan rasa kepuasan kepada yang dilayani
4. Responsivitas yaitu berkaitan dengan tanggung jawab birokrat dalam respons kebutuhan publik yang sangat mendesak.
5. Akuntabilitas yaitu berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan kewenangan administrasi publik.

Bab 8

Kode Etik_

BAB VIII

KODE ETIK

Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan tugas-tugas tidak terbatas pada organisasi-organisasi yang memiliki keahlian khusus atau mempunyai sertifikat kompetensi dan pada pelaksanaannya tidak hanya pada anggota profesi saja karena sesungguhnya setiap jenis pekerjaan dan setiap jenjang keputusan mengandung konsekuensi moral atau etika.

1. Yang perlu diingat bahwa kode etik ialah:
2. Tidak membebankan sanksi hukum atau paksaan fisik melainkan dari rasa kemanusiaan
3. Merupakan hasil kesepakatan atau konvensi suatu kelompok sosial.
4. Persetujuan bersama yang timbul dari diri para anggota itu sendiri untuk lebih mengarahkan perkembangan sesuai dengan nilai-nilai ideal yang diharapkan.
5. Bisa menjadi sarana mendukung pencapaian tujuan organisasi
6. Dapat mendorong keberhasilan organisasi.

A. Kode Etik (dalam M. Yatimin; 2008)

Kode etik pertama kali dicetuskan Hippokrates (511–423 SM) adalah seorang dokter Yunani kuno yang diberi gelar "Bapak Ilmu Kedokteran". Dan para ahli sejarah meragukan bahwa kode etik diciptakannya apa benar hasil pikiran Hippokrates sendiri namun yang berasal dari kalangan murid-murid Hippokrates dan meneruskan semangat profesionalisme yang diwariskan dari Hippokrates. (h.683)

1. Kode Etik bagi Administrator Publik

Kode etik merupakan pedoman perilaku yang diharapkan dari administrator publik dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini penting untuk memastikan bahwa administrator publik bertindak secara profesional, akuntabel, dan etis.

Beberapa prinsip utama dalam kode etik bagi administrator publik:

- a. Integritas: Administrator publik harus bertindak dengan integritas dan kejujuran dalam semua aspek pekerjaannya.
- b. Objektivitas: Administrator publik harus bertindak secara objektif dan tidak memihak dalam menjalankan tugasnya.
- c. Keterampilan dan profesionalisme: Administrator publik harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk menjalankan tugasnya secara profesional.
- d. Akuntabilitas: Administrator publik harus bertanggung jawab atas tindakannya kepada publik.

DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

- e. Keadilan dan kesetaraan: Administrator publik harus bertindak dengan adil dan setara dalam melayani publik.
 - f. Keterbukaan dan transparansi: Administrator publik harus terbuka dan transparan dalam menjalankan tugasnya.
 - g. Kepedulian terhadap publik: Administrator publik harus selalu mengutamakan kepentingan publik dalam menjalankan tugasnya.
2. Contoh Penerapan Kode Etik

Seorang administrator publik menolak suap dari pihak yang ingin mendapatkan keuntungan dalam proses pengadaan. Seorang administrator publik membuat keputusan yang menguntungkan semua pihak, meskipun ada pihak yang tidak puas dengan keputusan tersebut. Seorang administrator publik merahasiakan informasi sensitif yang dapat membahayakan publik. Seorang administrator publik dengan terbuka menjelaskan alasan di balik keputusannya kepada publik.

Pentingnya Kode Etik bagi administrator publik karena:

- a. Memberikan pedoman perilaku yang jelas.
- b. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
- c. Mencegah dan memberantas korupsi.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- e. Memperkuat demokrasi.

Kode etik merupakan alat penting untuk memastikan bahwa administrator publik bertindak secara profesional, akuntabel, dan etis. Penerapan kode etik dapat membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

3. Kode Etik Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pembinaan ASN akan berhasil apabila diikuti pelaksanaan dan penerapan kode etik dan kode perilaku dalam kehidupan sehari-hari ASN sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dalam melaksanakan tugas dan berisi pengaturan pegawai bertujuan menjaga martabat dan kehormatan.

Etika Aparatur Sipil Negara dalam bernegara meliputi:

- a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945
- b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara
- c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam negara Kesatuan RI
- d. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas
- e. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

- f. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah
- g. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien efektif
- h. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Etika ASN dalam berorganisasi meliputi:

- a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan berlaku
- b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia
- c. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang
- d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi
- e. Menjalin kerja sama secara komprehensif dengan unit kerja lain yang terkait dalam pencapaian tujuan
- f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas
- g. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja
- h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif
- i. Berorientasi upaya peningkatan kualitas kerja.

Etika ASN dalam masyarakat:

- a. Mewujudkan pola hidup sederhana
- b. Memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan.

- c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
- d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat
- e. Berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Etika ASN terhadap diri sendiri:

- a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi tidak benar
- b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan
- c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan.
- d. Berinisiatif meningkatkan kualitas pengetahuan kemampuan, keterampilan dan sikap
- e. Memiliki daya saing tinggi
- f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani
- g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga
- h. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.

Etika ASN dengan sesama pegawai:

- a. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agam/kepercayaan lain
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan
- c. Saling menghormati antara teman sejawat, baik vertikal, horizontal, dalam unit kerja, instansi, antar instansi
- d. Menghargai perbedaan pendapat

DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

- e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat
- f. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif
- g. Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai RI yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua pegawai dalam memperjuangkan haknya.

Contoh-contoh kasus etika yang terjadi dalam masyarakat Indonesia

Kasus Pelanggaran Etika Administrasi Publik (Studi Kasus Buruknya Pelayanan Bea Cukai) - Kompasiana.com (Etika administrasi publik merupakan seperangkat prinsip dan nilai yang harus dipegang teguh oleh para Pegawai Negeri Sipil ketika...)17 Apr 2024

BBC, Pendidikan: Diguncang skandal guru besar, Universitas Lambung Mangkurat dijatuhi sanksi penurunan akreditasi (Kasus dugaan rekayasa syarat-syarat permohonan guru besar yang dilakukan oleh 11 dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM)...)-11 Jul 2024

LAN RI, Urgensi Etika Administrasi dalam Pelayanan Publik Di bulan Agustus tahun 2022 Indonesia telah memasuki usia 77 tahun kemerdekaan. Pencapaian ini perlu dimaknai oleh setiap warga negara untuk...,1 Sep 2022

Koran TEMPO, Mempertanyakan Netralitas Jokowi di Pemilu 2024, Belakangan ini sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi kerap membuat gaduh publik. Dari indikasi keberpihakannya kepada salah satu pasangan..., 13 Feb 2024

DAFTAR PUSTAKA

- Djohan Djohermansyah, Milan. 2021. Etika Pemerintahan. Universitas Terbuka: Jakarta.
- Hiplunudin Agus. 2021. Etika Administrasi Negara Kajian Moral Penyelenggaraan Pemerintahan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Andi Offset: Yogyakarta
- Imam Fakhruddin Ar-Razi, 2023, Kitab Firasat Ilmu Membaca sifat dan Karakter Manusia dari bentuk tubuhnya. Rena Turos Group: Jakarta.
- Kumorotomo Wahyudi. 2018. Etika Administrasi Negara. Raja Grafindo: Jakarta
- Keban Yeremias T, Prof.Dr.S.M.MURP. 2019. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu (Edisi Revisi). Gava Media: Yogyakarta.
- M. Chazienul Ulum, Luthfi J.Kurniawan. 2021. Etika Administrasi Publik. Intrans Publishing: Jatim.
- Moekijat. 1995. Asas-Asas Etika. Mandar Maju: Bandung.
- M. Yatimin Abdullah. 2006. Pengantar Studi Etika. Radja Grafindo: Jakarta
- Prasetijowati Tri. 2012. Etika Profesi Humas. Alpha: Surabaya
- Pasalong Harbani. 2022. Teori Administrasi Publik. Alfabeta: Bandung

DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2004 TENTANG PEMBINAAN JIWA
KORPS DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGRI SIPIL

Umam Kerul M.Si. M.Ag. 2019. Etika Administrasi. Pustaka Setia:
Bandung

Rohman Abd. S.Sos.M.AP. 2018. Dasar-dasar Manajemen Publik.
Empat Dua: Malang, Jawa Timur.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur
Sipil Negara

Wijaya A.W., Drs. 1999. Etika Administrasi Negara. Bumi Aksara:
Jakarta

Zulkarnain Wildan M.Pd., Raden Bambang Sumarsono Dr., M.Pd.
2018. Manajemen dan Etika Perkantoran. Remaja Rosdakarya:
Bandung.

Sumber lain:

Priscilla. Ilustrasi Membaca. Credit: unsplash.com/Priscilla)

Laudia Tysara, Etika Adalah Menurut Para Ahli Baik Buruk
Tingkah Laku, [https://www.liputan6.com/hot/read/4567456/
etika-adalah-menurut-para-ahli-baik-buruk-tingkah-laku-
simak-lebih-jauh?page=6](https://www.liputan6.com/hot/read/4567456/etika-adalah-menurut-para-ahli-baik-buruk-tingkah-laku-simak-lebih-jauh?page=6)

American Society for Public Administration (ASPA): [https://www.
konsistensi.com/2014/03/mengatasi-angkettidak-valid.html](https://www.konsistensi.com/2014/03/mengatasi-angkettidak-valid.html)

International City/County Management Association (ICMA):
[https://www.konsistensi.com/2014/03/mengatasi-
angkettidak-valid.html](https://www.konsistensi.com/2014/03/mengatasi-angkettidak-valid.html)

United Nations Public Administration Network (UNPAN):
<https://www.konsistensi.com/2014/03/mengatasi-angkettidak-valid.html>

Ilustrasi Membaca Buku. Credit: pexels.com/Piho

Ilustrasi Membaca Buku. Credit: freepik.com

DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

LAMPIRAN

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PEGAWAI
NEGRI SIPIL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. Bahwa Pegawai Negri Sipil yang kuat, kompak dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur Negara dan abdi masyarakat, dapat diwujudkan melalui pembinaan korps Pegawai Negri Sipil, termasuk kode etiknya;
- b. Bahwa untuk menanamkan jiwa korps dan mengamalkan etika bagi Pegawai Negri Sipil, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negri Sipil;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ssebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999

(Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki Organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan

DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

Republik Indonesia.

2. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
3. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
4. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir korps dan kode etik.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
6. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II

PEMBINAAN JIWA KORPS PEGAWAI NEGRI SIPIL

Pasal 2

Pembinaan jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan, dan ketaatan Pegawai Negeri Sipil kepada Negara kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk :

- a. Membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteladanan Pegawai Negeri Sipil.
- b. Mendorong etos kerja Pegawai Negeri sipil untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur Negara, dan abdi masyarakat.
- c. Menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Ruang lingkup pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil mencakup :

- a. Peningkatan etos kerja dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil;
- b. Partisipasi dalam penyusunan kebijaksanaan Pemerintah yang terkait dengan Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peningkatan kerja sama antar Pegawai Negeri Sipil untuk memelihara dan memupuk kesetiakawanan dalam rangka meningkatkan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil;
- d. Perlindungan terhadap hak-hak, sipil atau kepentingan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-

DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan Negara.

Pasal 5

Untuk mewujudkan pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dan menjunjung tinggi kehormatan serta keteladanan sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari, Kode Etik dipandang merupakan landasan yang dapat mewujudkan hal tersebut.

BAB III

NILAI-NILAI DASAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 6

Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Semangat nasionalisme;
- d. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. Tidak diskriminatif;
- h. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;

- i. Semangat jiwa korps.

BAB IV

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 7

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Etika dalam bernegara meliputi:

Pasal 8

- a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan bernegara;
- c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijaksanaan dan program Pemerintah;
- g. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
- h. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

Pasal 9

Etika dalam berorganisasi adalah :

- a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. Melaksanakan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. Menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 10

Etika dalam bermasyarakat meliputi :

- a. Mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan ;
- c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 11

Etika terhadap diri sendiri meliputi :

- a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, dan sikap;
- e. Memiliki daya juang yang tinggi;
- f. Memelihara kesehatan rohani dan jasmani;
- g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. Berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.

Pasal 12

Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil meliputi :

- a. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama pegawai negeri sipil;
- c. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. Menghargai perbedaan pendapat;
- e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat pegawai negeri sipil;
- f. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama

DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

pegawai negeri sipil;

- g. Berhimpun dalam satu wadah korps pegawai republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua pegawai negeri sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.

BAB V

KODE ETIK INSTANSI DAN KODE ETIK PROFESI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan ketentuan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini :
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi;
 - b. Organisasi profesi di lingkungan Pegawai Negeri Sipil menetapkan kode etiknya masing-masing.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing instansi dan organisasi profesi.

Pasal 14

Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB VI

PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral;
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV.

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

Pasal 17

- (1) Untuk menegakkan kode etik, pada setiap instansi dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.

Pasal 19

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai Negeri Sipil yang disangka melanggar kode etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud

dalam ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

(5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

Pasal 20

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

Pasal 21

Kode etik profesi di lingkungan Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

**Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Oktober 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

ttd

BAMBANG KESOWO

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
2004 NOMOR 142**

TENTANG PENULIS

Tri Prasetijowati tenaga pengajar di FISIP Universitas Bhayangkara Surabaya, menempuh pendidikan sarjana di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya program studi Ilmu Administrasi Negara tahun 1990, dan menyelesaikan pendidikan magister di Universitas 17 Agustus 1945 bidang kebijakan publik tahun 2002.

Buku yang telah diterbitkan Etika Profesi Humas tahun 2012, Manajemen dan Pelayanan Publik 2018, Pengembangan Masyarakat Melalui Aset Komunitas, 2018, Pokok-pokok kebijakan publik tahun 2022.

Karya yang telah dihasilkan dalam bentuk jurnal tahun 2002 dengan judul Kebijakan anti korupsi pada jurnal Dialektika UBHARA Surabaya, tahun 2009 dengan judul Persepsi Masyarakat Kota Terhadap Profesi Ludruk di Surabaya (jurnal KOMTI Surabaya), Membangun keberdayaan usaha melalui refungsionalisasi aset pada komunitas pemulung di Kota Surabaya (2018) dan beberapa karya yang terbit sampai saat ini.

SINOPSIS

Etika publik bukanlah sekadar teori yang dipelajari di bangku kuliah atau dibaca dalam buku, melainkan sebuah praksis yang dihidupi dan diaktualisasikan dalam setiap tindakan. Refleksi atas nilai-nilai etika publik mendorong kita untuk terus berbenah, memperbaiki diri, dan berkontribusi secara positif bagi kemajuan bangsa.

Dalam buku Dasar-dasar etika publik sebagai panduan memahami fondasi etika dalam ranah publik, dimana mengingat pentingnya etika dalam memberikan pemahaman komprehensif mengenai prinsip-prinsip etika yang mendasari tindakan dan kebijakan dalam pelayanan publik. Buku ini membahas konsep dasar etika, sejarah etika, teori-teori etika, nilai etika dan dasar etika, perbandingan etika, etika penyelenggara negara, etika pelayanan publik dan kode etik. yang diharapkan dapat sebagai pegangan dalam mempelajari tentang dasar-dasar etika publik yang mana konsep-konsep inti etika publik, mulai dari nilai-nilai dasar, prinsip-prinsip moral, dalam memahami dan menerapkan etika publik secara efektif.

Buku ini dapat dibaca bagi para pemangku kepentingan, akademisi, mahasiswa, dan seluruh masyarakat yang peduli terhadap tindakan baik dan tindakan buruk tercermin dalam perilaku manusia. Semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih dalam mewujudkan etika publik bagi kita semua.

DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

Etika publik bukanlah sekadar teori yang dipelajari di bangku kuliah atau dibaca dalam buku, melainkan sebuah praksis yang dihidupi dan diaktualisasikan dalam setiap tindakan. Refleksi atas nilai-nilai etika publik mendorong kita untuk terus berbenah, memperbaiki diri, dan berkontribusi secara positif bagi kemajuan bangsa. Dalam buku Dasar-dasar Etika Publik sebagai panduan memahami fondasi etika dalam ranah publik, dimana mengingat pentingnya etika dalam memberikan pemahaman komprehensif mengenai prinsip-prinsip etika yang mendasari tindakan dan kebijakan dalam pelayanan publik. Buku ini membahas konsep dasar etika, sejarah etika, teori-teori etika, nilai etika dan dasar etika, perbandingan etika, etika penyelenggara negara, etika pelayanan publik dan kode etik yang diharapkan dapat sebagai pegangan dalam mempelajari tentang dasar-dasar etika publik yang mana konsep-konsep inti etika publik, mulai dari nilai-nilai dasar, prinsip-prinsip moral, dalam memahami dan menerapkan etika publik secara efektif. Buku ini dapat dibaca bagi para pemangku kepentingan, akademisi, mahasiswa, dan seluruh masyarakat yang peduli terhadap tindakan baik dan tindakan buruk tercermin dalam perilaku manusia. Semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih dalam mewujudkan etika publik bagi kita semua.



DASAR-DASAR ETIKA PUBLIK

jakad publishing
by PT. Jeef Legal Corpora
jakadmebiag@gmail.com | 081230444797
http://www.jakad.id

Jakad.id
international book publisher

Ilmu Politik
ISBN 978-634-7228-33-6 (PDF)
9 786347 228116